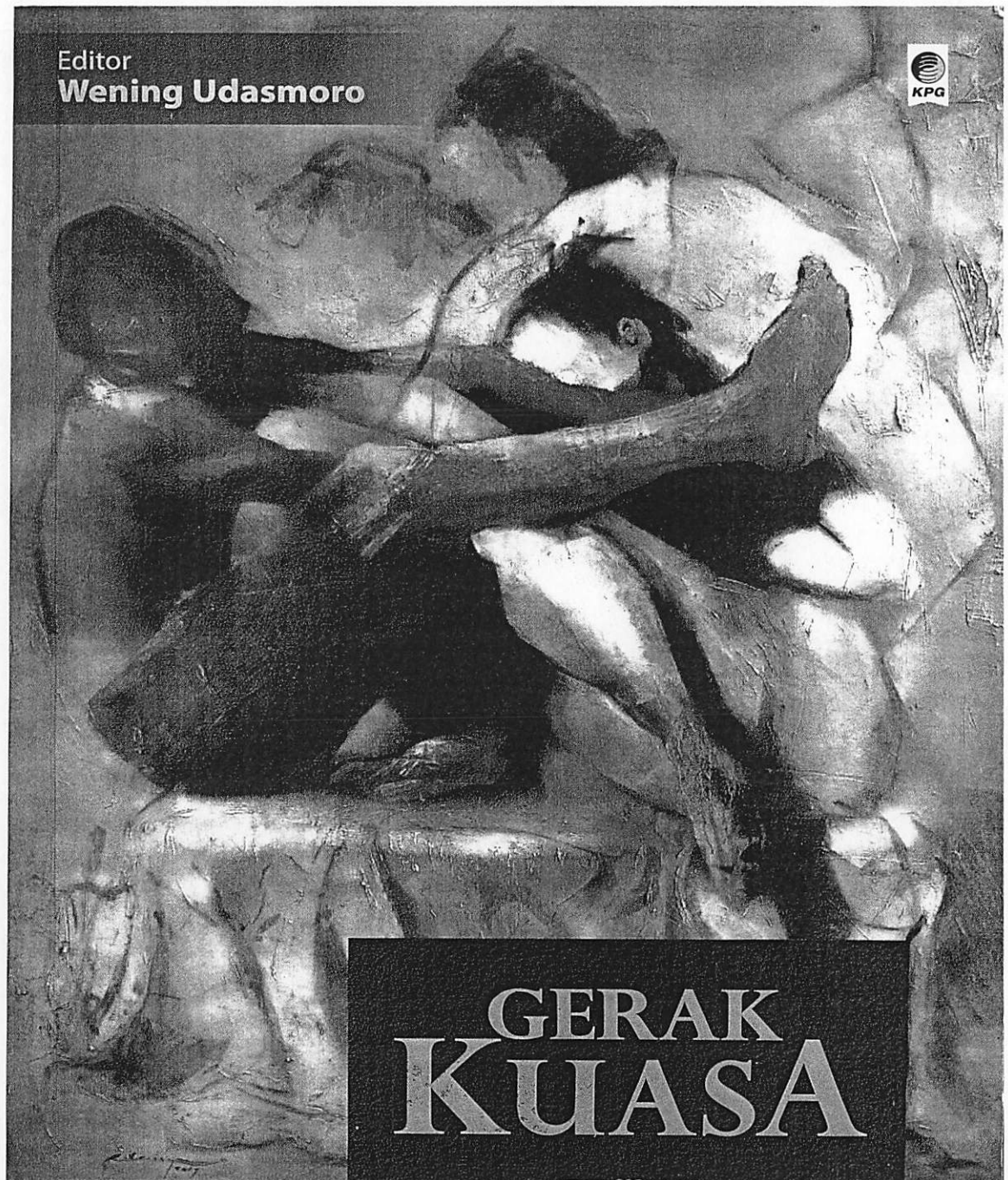


Editor
Wening Udasmoro



GERAK KUASA

—•••—
Politik Wacana, Identitas, dan
Ruang/Waktu dalam Bingkai Kajian
Budaya dan Media

GERAK KUASA

—•••—
Politik Wacana, Identitas, dan
Ruang/Waktu dalam Bingkai Kajian
Budaya dan Media

GERAK KUASA

—••—
Politik Wacana, Identitas, dan
Ruang/Waktu dalam Bingkai Kajian
Budaya dan Media

Editor
Wening Udasmoro



Jakarta:
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

**Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Gerak Kuasa: Politik Wacana, Identitas, dan Ruang/Waktu
dalam Bingkai Kajian Budaya dan Media**

© Wening Udasmoro

KPG 59 20 01819

Cetakan Pertama, Juli 2020

Editor

Wening Udasmoro

Perancang Sampul

Wendie Artswenda

Penata Letak

Wendie Artswenda

UDASMORO, Wening et al.

**Gerak Kuasa: Politik Wacana, Identitas, dan Ruang/Waktu
dalam Bingkai Kajian Budaya dan Media**

Jakarta; KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2020

xx + 363; 15 cm x 23 cm

ISBN: 978-602-481-416-8

Gambar Sampul

Ayu Rika, "Both Sides", akrilik di kanvas, 150 cm x 130 cm, 2017

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.
Isi di luar tanggung jawab percetakan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar <i>Wening Udasmoro</i>	vii
BAGIAN I: KONSEP-KONSEP DASAR	1
• Cultural Studies sebagai Proyek Dekolonisasi Produksi Pengetahuan <i>Budiawan</i>	3
• Ekonomi Politik Kebudayaan <i>Sugeng Bayu Wahyono</i>	19
• Politik Representasi di Era Serbamedia <i>Ratna Noviani</i>	59
BAGIAN II: BAHASA DAN WACANA	85
• Pemberontakan Linguistik Kristeva: Perempuan sebagai Liyan dalam Politik Bahasa <i>Dewi Candraningrum</i>	87
• Slavoj Žižek, Bahasa, dan Kekerasan <i>Ramayda Akmal</i>	113

• Merambah Wacana Diaspora: Pulang Itu Apa? Wacana Naratif Kaum Eksil <i>Kris Budiman</i>	131
• Christian Metz: Mengangankan Bahasa dalam Sinema <i>Budi Irawanto</i>	151
BAGIAN III: SUBJEK DAN IDENTITAS	173
• Memahami Budaya Kaum Muda dan Pascasubkultur via Andy Bennett <i>Oki Rahadianto Sutopo</i>	175
• Deleuze: Matinya Kebenaran dan Lahirnya Kenyataan <i>Dian Arymami</i>	193
• Perempuan-perempuan di Internet: Membahas Gender Bersama Angela McRobble <i>Suzie Handajani</i>	213
BAGIAN IV: POLITIK RUANG DAN WAKTU	235
• Dromologi, Dromokrasi, dan Kontrol: Politik Kecepatan Menurut Paul Virilio <i>Heru Nugroho</i>	237
• Ruang Kota Yogyakarta dalam Perspektif Produksi Ruang Henri Lefebvre <i>Faruk</i>	257
• Ruang Sosial Bourdieusian <i>Wisma Nugraha Christianto Richardus</i>	293
• Masa Lalu (yang Belum Berlalu) dalam Masa Kini: Membaca Ulang Pemikiran Pascakolonial Bhabha <i>Ikwon Setiawan</i>	317
Indeks	347
Tentang Penulis dan Editor	353

KATA PENGANTAR

Wening Udasmoro

Ketika membaca naskah drama atau menonton pertunjukan teater *En Attendant Godot* karya Samuel Beckett (1952), kita melihat beberapa tokoh di dalam cerita, yakni Vladimir dan Estragon, sedang menunggu seseorang yang diceritakan bernama Godot. Di *scene* pertama, mereka mencoba membunuh waktu menunggu Godot yang tidak juga datang sampai *scene* ini berakhir. Di *scene* kedua, mereka masih menunggu Godot. Hanya saja, lembar daun mulai tumbuh di pohon yang tidak ada di dalam *scene* pertama. Mereka kembali mencoba membunuh waktu dengan mengoceh, mengomel, dan mendiskusikan banyak hal. Tetap saja, Godot tidak pernah hadir sampai cerita berakhir.

Cerita di atas menjelaskan dimensi ruang dan waktu yang menjadi inti dari sebuah penggambaran situasi. Ruang dijelaskan dengan *background* tempat yang berbeda. *Background* pada *scene* pertama adalah pohon tanpa daun. Sementara itu, *background* pada *scene* kedua adalah pohon dengan daun yang sudah tumbuh. Dalam hal ini,

dimensi waktu dijelaskan dari lamanya para tokoh menunggu Godot. Daun yang tumbuh juga menjelaskan dimensi waktu tersebut, antara masa sebelum dan sesudahnya. Namun, hal yang sebetulnya penting untuk dicermati secara detail terkait waktu adalah judul drama tersebut, yakni *En Attendant Godot*. Naskah drama ini antara lain diterjemahkan Rendra dari versi bahasa Inggris, *Waiting for Godot*, ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Menunggu Godot*. Padahal, “*en attendant*”—dari kata kerja bahasa Prancis “*attendre* (menunggu)” yang diberi kata “*en*” dan akhiran “*-ant*”—sebetulnya berarti “sambil menunggu”. Sayangnya, “sambil” justru sering dihilangkan, padahal kata “sambil” tersebut adalah keseluruhan isi cerita ketika para tokoh membunuh waktu *sambil* menunggu Godot. “Sambil” di situ merepresentasikan proses dengan dinamika pemikiran yang dibangun, sebuah dimensi antara. Ia bukan hanya blok ruang dan waktu yang terpisah secara fisik seperti halnya dalam pendekatan filosofi eksistensial *ici et maintenant* (di sini dan sekarang) (Margerrison et al., 2008), melainkan ada ruang-ruang antara yang menunjukkan sebuah proses (historis) dari pergerakan ruang dan waktu tersebut. Ruang juga bukan hanya persoalan geografis, karena di dalam ruang “sambil” ada banyak hal: pengetahuan, memori, harapan, *trajectory*, cinta, identitas, dan sebagainya. Dalam penggunaan dimensi “sambil” tersebut, bahasa dan wacana memainkan peran yang sangat signifikan. Bahasa dan wacana ditunjukkan dari cara para tokoh menggambarkan diri (*self*) dan liyan (*other*), seperti halnya cara manusia dalam keseharian melakukan hal yang sama.

Dalam perspektif kajian budaya dan media (*media and cultural studies*), ruang dan waktu memiliki interpretasi yang multi-dimensional. Ruang dan waktu tidak bisa lagi dilihat secara kaku dalam konteks *ici et maintenant*, yakni ruang di sini dan sekarang yang bersifat fisik. Pembahasan mengenai *everyday life*, misalnya, mungkin membahas ruang di sini dan sekarang, tetapi dalam temporalitas yang bergerak (Burkitt, 2004)—dalam proses, dalam produksi pengetahuan, dalam tema-tema yang kadang tidak dipikirkan orang ketika menginterpretasikan budaya, karena sering kali hanya terfokus pada budaya sebagai sebuah produk. Budaya bukan hanya soal ide,

gagasan, atau perilaku, melainkan juga merupakan sebuah praktik sosial tempat subjek-subjek berinteraksi di dalam ruang dan waktu. Kajian budaya dan media melihat budaya sebagai *a whole way of life* yang dilakoni manusia.

Dalam kajian budaya dan media, ketika budaya dibahas di dalam dimensi ruang dan waktu, maka itu bukan hanya berkenaan dengan produk budaya yang dilestarikan dan menjadi bagian (yang sering disebut sebagai jati diri) subjek yang diposisikan sebagai agen pasif budaya tersebut. Namun, aspek-aspek lain, seperti relasi kekuasaan, peran subjek, kontestasi, negosiasi, resistansi, proses, perjuangan identitas, dan sebagainya, justru menjadi bagian penting dalam melihat manusia dan sosialnya. Hal ini karena, di dalam kajian budaya dan media, yang dilihat adalah pentingnya subjek sebagai yang menggerakkan ruang dan waktu tersebut. Subjek adalah subjek yang aktif, sekecil apa pun bentuk usahanya.

Sebagai contoh, dalam situasi pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal 2020, setiap ruang dan waktu digerakkan dengan sangat cepat oleh subjek-subjek. Ruang berubah dengan cepat, karena sebuah ruang yang pada hari sebelumnya terbuka akan bisa sama sekali tertutup pada hari sesudahnya akibat ditutupnya wilayah-wilayah di berbagai penjuru dunia untuk tujuan *social security* (BBC News, 17 Maret 2020). Ruang-ruang virtual juga dipenuhi berbagai informasi yang bergerak dengan sangat cepat karena partisipasi *the crowd* dalam membangun diversitas wacana mereka. Dengan banyaknya informasi di berbagai media, terutama media sosial, orang tidak lagi bisa mengingat dari mana informasi tersebut berasal, apa isinya, atau apa distingsinya dengan informasi-informasi lain di berbagai grup media sosial yang berbeda. Kebenaran informasi pun tidak lagi dipertanyakan, karena yang menjadi kebenaran adalah yang dipercayai. Pembicaraan mengenai waktu dengan demikian bukan persoalan waktu secara general, melainkan juga bersifat temporal. Temporalitas artinya terkait dengan cepat atau lambatnya sebuah kejadian diceritakan. Kecepatan isu yang tersebar menggunakan ruang virtual menjadikan ruang dan waktu berkelindan dan digerakkan untuk tujuan yang berbeda-beda. Seorang subjek mungkin tertarik pada penjelasan “siapa” dirinya

dengan hadir di ruang dan waktu tersebut, sehingga siapa paling cepat muncul di media sosial atau paling cepat mengunggah sebuah berita menjadi tujuan utama subjek tersebut. Frekuensi kehadirannya di dalam sebuah grup di ruang media sosial menjelaskan juga keberadaan subjek tersebut. Dia “mengada” karena kehadirannya di ruang media sosial. Untuk itu, orang berbondong-bondong ingin videonya menjadi viral untuk menunjukkan kediriannya, meskipun kadang isi videonya menunjukkan aksi-aksi berbahaya, memerkosa hak orang lain, dan sebagainya. Namun, viralnya video tersebut dianggap memberikan kredit bagi pengunggahnya. Sementara itu, subjek lain mungkin lebih tertarik mengurus “others” dalam penggunaan ruang tersebut, sehingga dia merasa perlu memberi komentar pada apa yang dilakukan orang, meskipun hal itu tidak ada relevansinya dengan dirinya.

Waktu yang bergerak meskipun dalam temporalitas yang rendah, misalnya dalam waktu yang singkat, dapat menjelaskan juga dari cara sekelompok masyarakat mentransformasikan dirinya, dari kelompok dengan empati menjadi kelompok yang antipati. Sebagai contoh, bagaimana menjelaskan pemakaman jenazah penderita positif Covid-19 yang ditolak tiga kali di desanya sendiri? Blokade-blokade jalan dan teriakan-teriakan pengusiran dilakukan oleh warga terhadap jenazah tetangganya itu. Di tempat lain, karena penolakan yang sama, jenazah bahkan harus dikremasi, yang dalam hal ini memaksa keluarga almarhum mempraktikkan sesuatu di luar yang mereka percayai. Argumentasi pembelaan terhadap “self/selves”, sebagai perlindungan diri, harus bertabrakan dengan eksklusi terhadap “other/others”.

Ruang yang kontestatif juga terlihat pula dari cara pemerintah menolak kata “lockdown” sebagai terminologi penutupan wilayah tertentu untuk mengurangi penyebaran virus dan bahkan berulang kali menjelaskan mengenai *social distancing* atau kemudian menggunakan terminologi “pembatasan sosial berskala besar”. Terminologi-terminologi tersebut digunakan dengan klaim bahwa metode itu lebih tidak mengganggu roda perekonomian rakyat. Namun, di tingkat mikro, orang-orang di kampung-kampung di berbagai wilayah di Indonesia dengan terang-terangan menggunakan kata “lockdown” untuk menjelaskan sesuatu yang mereka praktikkan,

meskipun yang mereka lakukan tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pemerintah (tidak murni sebagaimana *lockdown* biasanya dilakukan). Terminologi “lockdown” yang mereka pakai ini dapat menjelaskan *misrecognition*, resistansi, maupun kontestasi dalam penggunaan ruang sosial.

Dari contoh-contoh di atas, tampak bahwa kajian budaya dan media melihat budaya sebagai entitas yang tidak bersifat *fix* dan stabil, tetapi selalu berinteraksi dan berproses (Barker, 2000). Kajian budaya dan media juga melihat bahwa budaya selalu dihubungkan dengan persoalan politik dan ekonomi. Hal ini karena selalu ada hegemoni dan dominasi kekuasaan yang bermain di dalam setiap aspek kehidupan. Namun, alih-alih patuh pada hegemoni dan dominasi kekuasaan yang sering kali digerakkan oleh narasi-narasi besar dan *dominant culture*, subjek secara konstan selalu melakukan perlawanan terhadap struktur-struktur kekuasaan tersebut (Foucault, 1982). Upaya-upaya subjek dalam perlawanan dan pemberontakan terhadap hegemoni dan dominasi kekuasaan bisa dilakukan lewat berbagai cara dan strategi.

Narasi-narasi besar harus bersiap-siap mengalami pergeseran-pergeseran kekuasaan karena terus-menerus digedor oleh narasi-narasi yang sering disebut sebagai narasi kecil (Lyotard, 1979). Posisi-posisi narasi kecil digerakkan oleh subjek-subjek kecil sebagai sebuah cara merekonstruksi *self identity*-nya agar posisi periferi mereka bergeser mengarah ke sentral. Namun, selalu ada usaha-usaha mempertahankan kekuasaan oleh mereka yang berada di sentral-sentral kekuasaan, bahkan dengan usaha yang lebih keras. Ada dinamika yang terus bergerak dan tidak pernah berhenti, sehingga proses pembentukan-pembentukan struktur baru kadang muncul atau kadang tidak muncul sama sekali. Berbagai pola yang muncul seiring dengan proses tersebut misalnya adalah hibridisasi, modifikasi, atau pencerabutan terhadap struktur yang menjadi bagian dari proses dinamika itu. Dengan demikian, narasi besar hampir selalu mencoba meneguhkan *status quo* sebagai yang merasa memegang kekuasaan. Namun, narasi-narasi kecil, dengan kekuatan mereka yang lain, juga

selalu hadir di dalam ruang-ruang kontestasi (Olson dan Lyotard, 1995; Lyotard, 1979).

Buku ini merupakan usaha untuk menjelaskan teori-teori yang banyak dipakai dalam kajian budaya dan media dan cara teori-teori tersebut digunakan untuk melihat situasi sosial masa kini. Kekuatan buku ini adalah dihadapkannya konsep-konsep dari berbagai teoretikus kajian budaya dan media yang belum banyak disentuh dalam perdebatan akademis di Indonesia. Tujuan diperkenalkannya pemikiran-pemikiran para teoretikus yang belum terlalu banyak digunakan—misalnya Paul Gilroy (2002) dengan teori tentang wacana diaspora, Paul Virilio (1977/2006) dengan teori mengenai dromologi, Andy Bennett dengan teori tentang *neo-tribes* yang mengadopsi konsep neotribalisme Michel Maffesoli dalam studi kepemudaan, Henri Lefebvre (1991) dengan teori tentang produksi ruang, atau Slavoj Žižek dengan teori tentang subjek dan bahasa—bertujuan melengkapi hadirnya teoretikus-teoretikus yang sudah banyak diperdebatkan sebelumnya tetapi masih terus menarik perhatian karena tajamnya perspektif mereka, seperti Stuart Hall (1997/2004) dengan teori tentang representasi, Homi Bhabha (1994) dengan teori-teori pascakolonialnya, atau Julia Kristeva dengan teori mengenai bahasa sebagai bagian dari pembentukan subjek (1969; 1977) yang juga ada di dalam buku ini. Teori-teori soal ruang dan waktu dengan fokusasi berbeda, misalnya tentang ruang-ruang representasi, ruang ketiga atau soal kecepatan, atau bahasa yang digunakan di dalam ruang dan waktu, tersebut dielaborasi secara teoretis dengan konsep-konsep yang dikemukakan secara elaboratif. Namun, selain aspek teoretis, kekuatan lain dari buku ini adalah kontekstualisasinya terhadap persoalan yang dihadapi dalam situasi masa kini. Tujuannya adalah agar buku ini tidak hanya berbicara soal teori yang mengawang, tetapi supaya teori itu sendiri dapat dipahami lewat konkretisasi-konkretisasi dengan kasus-kasus yang ada dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Hadirnya contoh-contoh yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari ini membuka ruang bagi pembaca umum nonakademisi untuk ikut belajar berkemampuan kritis ketika membaca situasi yang

dihadapi dalam kehidupan sosial yang semakin penuh tantangan karena hadir dan cepatnya gerak invasi teknologi komunikasi dan informatika.

Buku ini juga merupakan usaha menjelaskan secara kritis kajian budaya dan media yang secara keilmuan berkembang sedemikian pesat pada 3 dekade terakhir. Secara umum, kajian budaya dan media melihat budaya tidak sekadar sebagai produk, tetapi merupakan dinamika pemikiran, gagasan, dan praktik yang bersifat dinamis dan ideologis, serta merupakan proses kontestatif dan membutuhkan pencermatan lebih mendalam agar menjadi kontekstual dalam ruang sosial di Indonesia. Berbagai teori telah dipelajari oleh para mahasiswa dan para pembaca buku-buku kajian budaya dan media. Namun, karena buku-buku tersebut sebagian besar merupakan terjemahan teori, maka dari berbagai pengalaman di dalam proses belajar selama ini sering terjadi distorsi serta keengganan untuk memperdalam dan mengontekstualisasikan teori-teori tersebut. Sering kali terjadi pula pemotongan-pemotongan konsep yang diambil secara parsial tanpa menghubungkannya dengan konsep-konsep lain. Selain itu, perdebatan secara lebih luas yang menghubungkan satu teori dengan teori yang lain tidak banyak disentuh di dalam proses belajar mereka.

Buku ini tidak bermaksud menjadi alat pembenar atau bahkan alat kebenaran absolut dari pendefinisian dan pengontekstualisasian kajian budaya dan media. Namun, buku ini berkontribusi mengangkat relevansi-relevansi teoretis dalam hubungannya dengan situasi empiris agar dapat membantu pembaca untuk belajar kajian budaya dan media serta memahaminya secara lebih lekat.

Buku ini dibagi ke dalam empat bagian besar. Yang pertama berisi konsep-konsep dasar kajian budaya dan media, kedua berbicara tentang bahasa dan wacana, ketiga mengenai subjek dan identitas, serta keempat menyoal politik ruang dan waktu. Keempat bagian besar ini sengaja dimunculkan secara urut sebagai bagian yang merupakan debat kekinian dalam kajian budaya dan media.

Di dalam bagian pertama terdapat tiga muatan komprehensif tentang *framework* dasar ketika mempelajari Kajian Budaya. Tulisan pada bagian ini diawali dengan artikel Budiawan dengan judul “*Cultural*

Studies sebagai Proyek Dekolonisasi Produksi Pengetahuan”, yang memberikan pemahaman baik secara historis maupun epistemologis tentang Kajian Budaya yang menjadi landasan awal secara definisi, cara berpikir, dan cara melihat dengan kajian budaya. Penjelasan utama dari tulisan ini ialah mengenai cara kajian budaya melihat berbagai persoalan sentral dalam bangunan-bangunan teorinya. Salah satunya adalah bangunan dalam mendobrak dominasi erosentrisme yang menjadikan Kajian Budaya sebagai salah satu langkah dalam melakukan dekolonisasi, utamanya adalah dekolonisasi pengetahuan. Namun, dijelaskan oleh Budiawan bahwa bangsa terjajah atau bekas jajahan tidak pernah bisa lepas dari keterjajahannya secara historis dalam produksi pengetahuan tersebut, yang menempatkan mereka pada situasi ketidakberdayaan. Untuk itu, diperlukan kontekstualisasi ruang dan waktu dalam melihat produksi pengetahuan dengan terus-menerus mempertanyakan dinamikanya dan bahwa subjek hadir di dalam proses pembentukannya.

Artikel selanjutnya ditulis oleh Sugeng Bayu Wahyono dengan judul “Ekonomi Politik Kebudayaan”. Penulis menggarisbawahi pentingnya budaya dilihat dari perspektif politik. Dia kemudian menambahkan perspektif ekonomi sebagai bagian dari cara melihat budaya secara kritis. Ekonomi politik klasik yang didasarkan pada cara berpikir *Enlightenment*, yakni dengan model rasionalitas Cartesian dan empirisme Baconian, semakin bertransformasi ke ekonomi politik yang bersifat kritis. Namun, ekonomi politik kebudayaan perlu ditekankan karena berkembangnya fenomena global dengan terjadinya ekonomisasi budaya yang mengarah ke praktik neoliberalisme.

Tulisan ketiga, yang juga menjadi konsep dasar dan tema kunci dalam Kajian Budaya, mengenai representasi. Artikel ini ditulis oleh Ratna Noviani dengan judul “Politik Representasi di Era Serbamedia”. Beberapa subtema dijelaskan di dalam tulisan ini untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca ketika melakukan “*doing*” kajian budaya dan media. Penulis tidak hanya berfokus pada gagasan Stuart Hall tentang representasi sebagai proses produksi makna lewat bahasa, tetapi juga memaparkan perbedaan konsep representasi dan implikasi politis dari penggunaan konsep tersebut

dengan merujuk pada gagasan Karl Marx dan Gayatri C. Spivak. Dia juga menggarisbawahi peran krusial representasi di era serbamedia dan memberikan contoh-contoh serta langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika mengkaji praktik kekuasaan yang terjadi di dalam kehidupan sosial.

Bagian besar kedua buku ini berisi diskusi mengenai persoalan bahasa dan wacana. Ada empat penulis yang berkontribusi pada bagian ini. Pertama adalah Dewi Candraningrum yang mendiskusikan perspektif Julia Kristeva dalam melihat posisi perempuan dalam kaitannya dengan bahasa. Judul artikelnya adalah “Pemberontakan Linguistik Kristeva: Perempuan sebagai Liyan dalam Politik Bahasa”. Konsep yang dijelaskan ialah mengenai *abject*, yang disebut Kristeva sebagai kondisi terusir atau terbuang, disebut juga sebagai liyan. Bentuk peliyanan dengan konsep abjeksi ini dijelaskan dalam berbagai contoh seperti misogini, genosida, homofobia, dan sebagainya. *Abject* ini menurut Dewi Candraningrum, menyitir Kristeva, diletakkan di luar struktur simbolis dan hampir selalu dihilangkan dari struktur kebudayaan.

Pada artikel selanjutnya, berjudul “Slavoj Žižek, Bahasa, dan Kekerasan”, Ramayda Akmal menulis mengenai pemikiran Slavoj Žižek, seorang ahli pemikiran sosial dan budaya dari Slovenia. Dari tulisan Žižek yang sedemikian banyak sejak 1980-an sampai sekarang, penulis mengonsentrasikan diri pada pemikiran mengenai bahasa. Bahasa, disebutkan Ramayda, merujuk pada teoretikus yang sering disebut sebagai Elvis Presley-nya Kajian Budaya, merupakan manifestasi yang bertentangan dengan gagasan subjek yang bebas, karena bahasa merupakan dimensi simbolis yang memenjara subjek. Ramayda Akmal mencoba merunut pemikiran Žižek dari teoretikus-teoretikus sebelumnya yang dia rujuk, yakni Jacques Lacan dan Martin Heidegger. Salah satu aspek penting yang diangkat Žižek adalah bahasa yang dihubungkannya dengan konsep kekerasan. Cara berpikir Lacan dan cara berpikir filsafati Heidegger digunakannya untuk menjelaskan argumen bahwa cara komunikasi manusia lewat bahasa secara mendasar tidak menyediakan ruang yang egaliter.

Beroperasinya kekuasaan lewat bahasa menjadi salah satu hal penting di dalam praktik kekerasan.

Tulisan selanjutnya berjudul “Merambah Wacana Diaspora: Pulang itu Apa? Wacana Naratif Kaum Eksil”. Menggunakan perspektif Paul Gilroy, Kris Budiman menjelaskan kajian wacana diaspora yang tidak hanya merupakan *diaspora politics*, tetapi juga *diaspora poetics* (Gilroy, 2002). Disebutkan penulis, menyitir Gilroy, bahwa ada wacana-wacana yang dibangun dengan perspektif ini, yakni genre naratif, gejala intertekstualitas, *style* dan idiom-idiom, dan terakhir adalah *cultural inter-mixture* yang menghasilkan hibriditas bahasa. Kris Budiman memberikan contoh analisis secara kritis terhadap narasi orang-orang diaspora penyintas peristiwa 1965.

Pemikiran seorang teoretikus *cultural studies* lain ditulis oleh Budi Irawanto, yang berjudul “Christian Metz: Mengganggu ‘Bahasa’ dalam Sinema”. Satu hal yang diangkat di dalam tulisan ini adalah *point of view* utama posisi Metz dalam kajian sinema. Disebutkan oleh penulis bahwa alih-alih melihat makna sinema, Metz tertarik dengan proses film menciptakan makna sinema. Di dalam proses kreasi film tersebut, bahasa memegang peranan penting dalam penciptaan makna.

Pada bagian besar ketiga, ada tiga kontributor. Pertama adalah Oki Rahadianto Sutopo dengan artikel berjudul “Memahami Budaya Kaum Muda dan *Post-Subculture* Via Andy Bennett”. Penulis menyoroti perkembangan konsep subkultur dalam kajian kepemudaan (*youth studies*) yang telah dirintis oleh para pemikir kajian budaya dan media seperti Stuart Hall maupun Dick Hebdige pada 1970-an. Kajian spesifiknya disebut sebagai kajian *post-subculture*. Penulis menjelaskan dengan sangat gamblang mengenai perspektif dalam studi kepemudaan, yakni perspektif transisi (*youth transition*) dan perspektif budaya kaum muda (*youth culture*). Perspektif dasar keduanya cukup berbeda, yakni bahwa *youth transition* melihat pemuda dalam proses *becoming*, sedangkan *youth culture* melihat pemuda dari perspektif *being*. Selanjutnya, penulis memaparkan tentang limitasi konsep subkultur dan munculnya konsep *post-subculture*. Sebagai elaborasi, penulis memperkenalkan

konsep *neo-tribes* Andy Bennett. Bennett merujuk dan mengadopsi konsep neotribalisme yang dikemukakan oleh Michel Maffesoli serta mengaitkannya dengan fenomena musik dan gaya hidup kaum muda.

Perbincangan mengenai subjek lainnya ditulis oleh Dian Arymami dalam artikelnya yang berjudul “Deleuze: Matinya Kebenaran dan Lahirnya Kenyataan”. Penulis menjelaskan kritik Deleuze terhadap filsafat yang pada waktu itu berfokus ke persoalan “*being*” ke proses yang disebut sebagai “*becoming*”. Konsep *becoming* ini merupakan penolakan Deleuze pada konsep yang stabil, sehingga kemudian isu yang dia angkat adalah isu *difference* dan bukan lagi isu identitas yang sering kali dianggap sebagai bagian dari “*being*.” Gagasannya membuat subjek terus berpikir dan terus dalam proses menjadi.

Tulisan terakhir pada bagian ini merupakan diskusi mengenai subjek perempuan yang dihadirkan oleh Suzie Handajani dengan lensa dari pemikiran Angela McRobbie. Tulisan Suzie Handajani berjudul “Perempuan-Perempuan di Internet: Membahas Gender Bersama Angela McRobbie”. Penulis berargumen bahwa teknologi digital telah mentransformasi kehidupan sosial dan gender, terutama terkait dengan profesi perempuan. Masuknya perempuan ke dalam profesi di media, dengan menggunakan perspektif McRobbie, antara lain memunculkan apa yang disebut dengan *double entanglement* dan kecurigaan munculnya *faux-feminism*. Di satu sisi, seakan-akan perempuan memiliki kebebasan masuk ke dalam dunia profesi dengan penghasilan tinggi dan mampu mandiri secara ekonomi, tetapi di sisi lain diperdaya oleh kekuatan pasar dan kapitalisme yang memaksa mereka tunduk pada hukum pasar lewat *mindset* konsumerisme.

Pada bagian besar terakhir buku ini terdapat empat kontributor. Pertama adalah tulisan berjudul “Dromologi, Dromokrasi, dan Kontrol: Politik Kecepatan Menurut Paul Virilio” yang ditulis oleh Heru Nugroho. Penulis menjelaskan pemikiran Paul Virilio, seorang filsuf Prancis yang tertarik mendalami teori-teori budaya dalam kaitannya dengan teknologi informasi. Heru Nugroho menekankan pada posisi Virilio yang kritis terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Kecepatan teknologi komunikasi dan informasi menurut Virilio justru sering membawa pada *accident*

atau kecelakaan dan kecelakaan ini yang justru dianggap sebagai sebuah kebenaran. Menggunakan lensa berpikir Virilio, penulis juga mengingatkan bahwa tubuh manusia di era teknologi komunikasi dan informasi berada di bawah dominasi dan penjajahan teknologi itu sendiri.

Persoalan lain mengenai ruang ditulis oleh Faruk dengan judul "Ruang Kota Yogyakarta dalam Perspektif Produksi Ruang Henri Lefebvre". Faruk berargumen bahwa dalam konsep Lefebvre, ruang bukanlah sebuah wadah, melainkan medium yang menghubungkan subjek-subjek serta tindakan-tindakan dengan lingkungannya. Aktor-aktor dan lingkungan adalah sebuah kontinum. Praktik-praktik keruangan merupakan praktik-praktik representasional tempat subjek-subjek saling berkontestasi untuk mendominasi wacana.

Tulisan mengenai ruang selanjutnya ditulis oleh Wisma Nugraha Christianto Richardus dengan judul "Ruang Sosial Bourdieuan". Penulis menjelaskan konsep-konsep Bourdieu yang terkait dengan ruang sosial. Pada definisi awalnya, Wisma Nugraha memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara ruang fisik dan ruang sosial. Ruang sosial disebutnya sebagai ruang yang metaforis tempat modal-modal dioperasikan oleh agen-agen untuk tujuan-tujuan akumulasi modal. Berbagai modal yang digunakan, seperti modal budaya, modal simbolis, dan modal material, dijelaskan dengan berbagai contoh terkait dengan seni di Indonesia.

Tulisan terakhir dalam buku ini berjudul "Masa Lalu (yang Belum Berlalu) dalam Masa Kini: Membaca Ulang Pemikiran Pascakolonial Bhabha", yang ditulis oleh Ikwan Setiawan. Penulis secara spesifik melihat pemikiran-pemikiran Bhabha yang memandang budaya sebagai, yang disitir Ikwan Setiawan dari buku Homi Bhabha, *The Location of Culture* (1994), ruang keberantaraan dan kegandaan kultural. Budaya dilihat bukan semata sebagai ide atau gagasan yang didapat dari masa lalu atau masa kini. Penulis berargumen bahwa budaya selalu berada di dalam proses, berada di "ruang antara", menerobos dikotomi tradisional/modern, lokal/nasional, inklusi/eksklusi, dan sebagainya. Contoh-contoh ditunjukkan dalam tulisan

ini untuk memberikan penjelasan mengenai cara menggunakan perspektif Bhabha dalam penelitian sosial dan humaniora.

Daftar Pustaka

- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: SAGE Publications.
- BBC News, 2020. "Coronavirus: How Are Lockdowns and Other Measures Being Enforced?". BBC.com, 17 Maret 2020, diakses 2 April 2020. <https://www.bbc.com/news/world-51911340>.
- Beckett, Samuel. 1952. *En Attendant Godot*. Paris: Edition de Minuti.
- Bhabha, Homi K. 1994. *The Location of Culture*. London dan New York: Routledge.
- Burkitt, Ian. 2004. "The Time and Space of Everyday Life". *Cultural Studies*, Vol. 18, Issue 2-3, hlm. 211-227.
- Foucault, Michel. 1982. "The Subject and Power". *Critical Inquiry*, Vol. 8, No. 4 (Summer), hlm. 777-795.
- Gilroy, Paul. 2002. "Diaspora and the Detours of Identity". Dalam Kathryn Woodward (ed.), *Identity and Difference*, hlm. 299-343. London: SAGE Publications.
- Hall, Stuart. 1997/2014. "The Work of Representation". Dalam Stuart Hall, Jessica Evans, dan Sean Nixon (ed.), *Representation*, hlm. 1-47. London, Thousand Oaks, dan New Delhi: SAGE Publications.
- Kristeva, Julia. 1969. *Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art*. Diterjemahkan Leon Roudiez. New York: Columbia University Press.
- . 1977. "Le sujet en procès". Dalam Julia Kristeva, *Polylogue*. Paris: Seuil.
- Lefebvre, Henri. 1991. *The Production of Space*. Diterjemahkan Donald Nicholson Smith. Oxford (Inggris) dan Cambridge (AS): Basil Blackwell.
- Liotard, Jean François. 1979. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Margerrison, Christine, et al. (ed.). 2008. *Albert Camus in the 21st Century: A Reassessment of His Thinking at the Dawn of the New Millenium*. New York: Editions Rodopi.



EKONOMI POLITIK KEBUDAYAAN

Sugeng Bayu Wahyono

Pendahuluan

Apabila mahasiswa berusaha mencari melalui mesin pencari Google tentang ekonomi politik kebudayaan (*cultural political economy*) dengan menggunakan bahasa Indonesia, tentu mereka tidak akan menemukannya. Hal itu mengindikasikan bahwa ekonomi politik kebudayaan merupakan sebuah pendekatan dan analisis yang belum populer dan boleh jadi selama ini memang kurang mendapat perhatian dalam dunia akademis di Indonesia. Pendekatan dan analisis ekonomi politik itu sendiri juga masih relatif kurang mendapat perhatian, terlebih lagi dengan menggunakan paradigma kritis. Selama ini yang lebih mendapatkan perhatian hanya ekonomi politik klasik, terutama di lingkungan departemen ilmu ekonomi. Kebanyakan juga mereduksi ekonomi politik hanya mengaitkannya dengan isu kebijakan ekonomi, kebijakan publik, dan pelayanan publik.

Kecenderungan reduksionistis terhadap ekonomi politik seperti itu memang dapat dipahami, karena hanya merujuk pada ekonomi politik klasik karya Adam Smith. Pemahaman seperti itu semakin mendapatkan momentumnya ketika Indonesia pada masa Orde Baru sangat antusias terhadap *developmentalism*. Saat itu, sudut pandang perspektif kritis mengalami masa surut karena dianggap berpotensi mengganggu stabilitas politik yang menjadi prasyarat proses pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Implikasinya, ekonomi politik berparadigma kritis tidak mendapatkan ruang dalam berbagai diskusi publik, bahkan dalam dunia akademis.

Pada era Orde Baru, terutama mulai pertengahan dekade 1980-an, ada upaya untuk mengenalkan ekonomi politik kritis, tetapi baru terbatas pada teori ketergantungan, yang waktu itu banyak dibaca melalui tulisan-tulisan Arief Budiman. Arief Budiman mencoba mengeksplorasi pemikiran Andre Gunder Frank, Fernando Cardoso, dan beberapa pemikir berhaluan kiri dari Amerika Latin. Sementara itu, pada 1991 terbit sebuah buku yang berfokus pada ekonomi politik, yaitu *Arus Pemikiran Ekonomi Politik* oleh Amir Effendi Siregar sebagai editornya. Namun, buku ini lebih banyak mengaitkan tawaran konseptual dengan isu-isu pembangunan ekonomi seperti tulisan WW Rostow, Johan Galtung, dan Peter L. Berger. Ada juga yang terkait dengan teori ketergantungan, seperti tulisan Fernando Cardoso dan Samir Amin.

Setelah berakhirnya era Orde Baru, mulai bermunculan gagasan-gagasan berparadigma kritis pada berbagai forum akademis dan diskusi publik. Gagasan Karl Marx, neo-Marxisme, teori budaya Marxis, pascamodernisme, pascakolonial, dan pascastruktural mulai mendapat tempat dalam kurikulum di berbagai perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Budaya, dan Fakultas Ekonomi. Meskipun pada era Orde Baru analisis Gramscian dengan fokus pada negara hegemonik sudah sering mengemuka, tetapi baru setelah berakhirnya pemerintahan Soeharto perspektif kritis mulai semarak. Bahkan, pada aspek institusional juga mulai muncul program-program studi seperti Kajian Budaya dan Media di beberapa perguruan tinggi yang menggunakan dan mengeksplorasi

paradigma kritis serta terdapat mata kuliah Ekonomi Politik dalam kurikulumnya.

Perkembangan seperti itulah yang kemudian menjadikan pendekatan dan analisis ekonomi politik semakin mendapat tempat serta memperoleh perhatian luas. Berbagai skripsi, tesis, dan disertasi juga semakin banyak menggunakan pendekatan dan analisis ekonomi politik kritis dengan mengangkat isu-isu di seputar dinamika media, gender, budaya, olahraga, dan bahkan agama. Perkembangan lebih lanjut, pendekatan dan analisis ekonomi politik kritis juga mulai digunakan di berbagai disiplin, seperti sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu politik, antropologi, dan hubungan internasional. Semua itu sekaligus mengindikasikan bahwa masing-masing disiplin tidak menutup diri secara eksklusif, tetapi mulai terbuka pada pendekatan multidisiplin yang merupakan salah satu karakter penting pendekatan dalam kajian kritis.

Namun, pada saat yang sama, mulai maraknya pendekatan dan analisis ekonomi politik pada berbagai disiplin tersebut tidak secara otomatis diikuti oleh meningkatnya perhatian pada ekonomi politik kebudayaan. Sebagai bagian dari ekonomi politik kritis, pendekatan dan analisis ekonomi politik kebudayaan dapat dikatakan yang paling kurang mendapat perhatian dalam dunia akademis di Indonesia. Padahal, di dunia akademis Barat sudah banyak yang menyediakan literatur tentang ekonomi politik budaya, terutama sejak maraknya kajian terhadap fenomena globalisasi budaya. Sebut saja misalnya Bob Jessop, Jacqueline Best, Matthew Paterson, dan lain-lain, yang sebagian akan menjadi rujukan dalam tulisan ini.

Pendekatan dan analisis ekonomi politik kritis itu sendiri sudah cukup lama berkembang dan merambah ke berbagai disiplin. Dalam dunia literatur Barat mulai banyak yang menggunakan pendekatan ini, misalnya ekonomi politik kesehatan, ekonomi politik pendidikan, dan bahkan ekonomi politik olahraga. Michael R. Reich (2013), misalnya, membahas ekonomi politik kesehatan, sementara Mark Gradstein dan Moshe Justman serta Volker Meier (2005) mengeksplorasi pertumbuhan dan ketidakadilan dari perspektif ekonomi politik pendidikan. Dalam kaitannya dengan kajian budaya dan media,

pendekatan ekonomi politik kritis ini sudah menjadi bagian penting untuk mendekati dan menganalisis isu-isu di seputar fenomena kebudayaan dan media. Peter Golding (1997), misalnya, memiliki perhatian khusus terhadap ekonomi politik media; kemudian, yang paling populer adalah ekonomi politik komunikasi oleh Vincent Mosco (1996).

Tulisan ini sekadar memberikan pengantar menuju kajian yang lebih intensif terhadap ekonomi politik kebudayaan sebagai pendekatan dan analisis kritis terhadap berbagai fenomena sosial budaya di Indonesia. Tentu saja sebelum membahas materi inti, penting untuk menguraikan terlebih dahulu perkembangan ekonomi politik sebagai sebuah perspektif. Selama ini dikenal dua jenis ekonomi politik, yaitu ekonomi politik klasik yang bersumber dari Adam Smith dengan latar belakang masyarakat transisi dari agraris ke industri di Eropa dan ekonomi politik kritis yang bersumber pada pemikiran Karl Marx dengan latar belakang masyarakat industri bermoda produksi dari kapitalisme awal hingga kapitalisme akhir.

Secara berurutan, tulisan ini akan membahas mengenai ekonomi politik, konsep-konsep kebudayaan yang relevan, dan kemudian masuk ke materi ekonomi politik kebudayaan dengan mendiskusikan definisi dan fondasi teoretis, karakter utama, dan relevansinya dengan kajian budaya dan media. Kajian ini diharapkan akan memberikan bekal menuju ke pemahaman terhadap ekonomi politik kebudayaan secara lebih intensif. Di samping itu, pendiskusian ekonomi politik kebudayaan akan menambah pemahaman yang lebih kaya terhadap ekonomi yang berdimensi kebudayaan. Antara kebudayaan dan ekonomi ada hubungan resiprokal, sehingga akan dapat dikembangkan pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena ekonomi secara lebih signifikan. Lebih dari itu, diharapkan akan muncul pemahaman yang lebih kritis tentang “politik” dalam ekonomi politik yang mengandung ideologi. Demikian pula, akan dapat ditingkatkan kepekaan terhadap beroperasinya ideologi, karena kebudayaan memiliki karakter ideologis.

Ekonomi Politik Klasik

Sebelum membahas secara khusus mengenai ekonomi politik kebudayaan, penting untuk terlebih dahulu menilik kembali apa itu ekonomi politik. Secara epistemologis, ekonomi politik itu sendiri memiliki jejak historis, dimulai dari ekonomi politik klasik hingga ekonomi politik kritis. Bahkan, dalam perkembangan lebih lanjut, pendekatan dan analisis ekonomi politik bersinggungan dengan perspektif lain, seperti pascakolonialisme, pascamodernisme, dan pascastrukturalisme yang mengedepankan diskursus. Boleh jadi, itu merupakan konsekuensi logis atas karakter ekonomi politik yang bersifat inklusif, nondeterministik, dan multidisiplin.

Jejak riwayat ekonomi politik dimulai dari gagasan ekonomi klasik Adam Smith, yang secara tradisional memberi prioritas dalam memahami perubahan sosial dan transformasi historis. Bagi teoretikus ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill, ekonomi politik berarti memahami revolusi kapitalis hebat, yakni maraknya perubahan masyarakat dari yang sebelumnya menggunakan tenaga kerja pertanian ke tenaga kerja komersial, pabrikan, dan akhirnya menjadi masyarakat industrial. Sementara bagi teoretikus ekonomi politik kritis seperti Karl Marx, ekonomi politik berarti menguji kekuatan-kekuatan dinamis dalam kapitalisme yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perubahannya (Mosco, 1996: 27).

Adam Smith bukan guru besar bidang ekonomi, tetapi bidang filsafat moral, sehingga tidak mengherankan jika gagasan-gagasannya lebih bersifat moralistik. Setelah mengeksplorasi gagasannya tentang negara bangsa yang berorientasi pada isu kesejahteraan, yang lebih liberal-individualistik, Smith kemudian berfokus pada soal moralitas. Pergeseran pemikirannya itu membawa konsekuensi pada pergeseran gagasannya tentang ekonomi politik. Dia kemudian menawarkan pandangan mengenai peningkatan kualitas barang sosial tidak untuk kepentingan pribadi, sebagaimana argumen terakhirnya dalam *The Wealth of Nations* (1776), tetapi untuk kebajikan sistem sosial.

Terdapat dua titik pusat penting di sini. Pertama, moral, budaya, atau ranah spiritual menjadi pusat subjek analisisnya. Adam Smith memilih menulis *The Theory of Moral Sentiments* (1759/1976) sebelum menganalisis pembagian kerja pasar, karena baginya ini merupakan hal esensial untuk memahami basis moral masyarakat komersial yang terjadi di Inggris pada paruh abad ke-18. Dia merasa karyanya ini lebih baik daripada *The Wealth of Nations* (Mosco, 1996: 35). Pernyataan Smith itu sepertinya bukan dimaksudkan lebih baik dalam arti secara akademis, tetapi lebih karena alasan bahwa memahami persoalan ekonomi secara tunggal bukanlah pendekatan yang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Smith mulai menyadari semakin pentingnya pendekatan multidisiplin terhadap fenomena ekonomi.

Gagasan Smith tentang dimensi moral dan kultural dalam ekonomi pada waktu itu bukanlah sesuatu yang mudah dimengerti oleh cara berpikir Barat yang mengandalkan rasionalitas. Pendekatan moralistis Smith yang berusaha untuk tidak memisahkan antara ilmu pengetahuan dan moralitas dianggap berlawanan dengan arus utama pemikiran Barat pada waktu itu. Sebagaimana dikatakan Mosco, hal itu sulit dipahami, mengingat kultur Barat cenderung memisahkan antara ilmu pengetahuan dan moral. Sebagian orang, di satu sisi, senantiasa meneriakkan bahasa rasionalitas, logis, dan positivistik, tetapi di sisi lain mengatakan bahwa bahasa normatif memungkinkan kembalinya cara berpikir lama yang moralistis (Mosco, 1996: 35). Perdebatan bahasa rasionalitas dan bahasa moralitas dalam produksi pengetahuan Barat terus mewarnai proses selanjutnya, yang tecermin pada perbedaan antara fakta dan nilai, analisis dan preskripsi, serta ekonomi dan filsafat moral. Implikasi dari perdebatan ini adalah munculnya tanda-tanda pemikiran ekonomi arus utama yang mengedepankan rasionalitas yang mulai mengadopsi dan mempertimbangkan penggunaan bahasa moral dalam wacana ekonomi. Situasi ini kemudian menimbulkan iklim kondusif bagi perkembangan pendekatan dan analisis ekonomi politik.

Namun demikian, karya Smith yang berdimensi moralitas tersebut kurang mendapat perhatian dalam ekonomi politik klasik

karena dianggap tidak bersandar pada teori pilihan rasional. Dalam kajian akademis, yang menjadi sandaran ekonomi politik klasik tetap karya Smith sesudahnya, yaitu *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776/1937). Walaupun demikian, yang tetap menarik untuk dilihat adalah argumen moralistis Smith ketika melakukan analisis terhadap tenaga kerja. Hanya saja, perlu dicatat di sini bahwa memahami Smith hanya pada satu karya atau terbatas pada *The Wealth of Nations* saja akan berisiko terhadap pemahaman yang serampangan bahwa Smith adalah biang keladi dari maraknya ekonomi liberal yang menindas. Karena itu, memahami Smith bukan saja melakukan pembacaan terhadap *The Wealth of Nations* sebagaimana marak dibaca dalam literatur ekonomi di Indonesia, melainkan perlu juga membaca secara cermat terhadap *The Theory of Moral Sentiments*. Dengan demikian, akan ada pemahaman secara komprehensif dan terhindar dari kesimpulan secara serampangan terhadap Smith bahwa dia adalah bapak ekonomi liberal sebagaimana lazimnya anggapan yang berkembang di kalangan akademisi pada umumnya di Indonesia selama ini.

Adam Smith mempersoalkan alasan seorang algojo diberi gaji tinggi dianggap normal. Kualifikasinya toh rendah. Pekerjaannya hanya mensyaratkan satu tingkat latihan dan kompetensi yang rendah, serta tidak memakan banyak waktu. Namun, karena jenis pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling tidak menyenangkan, maka seharusnya diberi kompensasi dengan gaji tinggi. Alasan lain untuk menjustifikasi fakta bahwa para dokter juga dibayar tinggi adalah bahwa pekerjaan mereka menggiurkan dan menghasilkan banyak uang. Namun, karena pekerjaan itu melibatkan satu tingkat tanggung jawab, stres, dan kegelisahan yang tinggi serta rentan terhadap kritikan banyak orang bila pengobatan yang direkomendasikan gagal, maka mereka juga harus diberi kompensasi atas aspek-aspek negatif pekerjaannya itu, yakni berupa satu pendapatan layak yang tinggi. Pekerjaan-pekerjaan lain menuntut kualifikasi-kualifikasi yang lebih rendah, relatif menyenangkan, dan hanya menuntut tingkat tanggung jawab yang tidak terlalu tinggi. Dalam kasus-kasus ini gaji yang rendah bisa dibenarkan. Dengan kata lain, dalam berbagai pembahasan tentang

gaji, Smith berangkat dari ide bahwa gaji-gaji yang merupakan imbalan atas berbagai tipe aktivitas yang biasanya oleh orang dianggap cukup adil. Kedua, rasa keadilan ini didiktekan oleh suatu sistem alasan yang relatif implisit yang sedikit banyak dipahami oleh semua orang. Ketiga, alasan itu berkaitan dengan sejumlah dimensi dari satu pekerjaan tertentu. Terakhir, mengingat karakterisasi suatu pekerjaan dalam kaitannya dengan dimensi ini, maka orang pada umumnya berkesimpulan bahwa pekerjaan-pekerjaan tertentu memang harus dibayar tinggi. Menggunakan sebuah konsep dari *The Theory of Moral Sentiments* dari Smith, konsensus relatif yang muncul dalam kaitannya dengan pertanyaan tentang kemungkinan suatu pekerjaan seharusnya dibayar lebih tinggi dibandingkan pekerjaan lainnya berasal dari serangkaian alasan yang dikembangkan oleh "penonton yang tak memihak (*impartial spectator*)", oleh individu-individu yang mencoba memahami sistem alasan yang akan bisa diterima oleh semua orang (Boudon, 2011: 314).

Adanya dimensi etis dan nonekonomi ketika menganalisis tenaga kerja dalam suatu masyarakat bermoda produksi kapitalisme tersebut telah menunjukkan adanya salah satu karakter ekonomi politik, yaitu bahwa fenomena ekonomi tidak cukup hanya dijelaskan dari disiplin ekonomi saja, misalnya dari teori hukum permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja. Namun, secara umum pemikiran ekonomi politik klasik tetap berakar pada pemikiran *Enlightenment*. Mengikuti tradisi pemikiran *Enlightenment*, para teoretikus klasik tetap memelihara asumsi bahwa individu-individu mampu menggunakan akal untuk memaksimalkan kepentingan mereka dan kemudian memperluasnya ke ranah kepentingan masyarakat. Jadi, ekonomi politik klasik memang berdiri di atas dua pilar *Enlightenment*, yaitu rasionalitas Cartesian dan empirisme Baconian. Secara umum, ekonomi politik mencoba memperluas revolusi abad ke-17 dalam ilmu pengetahuan fisika dengan menerapkan prinsip-prinsip mekanis Galilean dan Newtonian ke dalam dunia kapitalisme abad ke-18 dan ke-19. Sebagaimana dikatakan Daniel Bell (1981), perhatian utama proyek ilmu pengetahuan adalah pergeseran dari belajar objek-

objek konkret ke konsentrasi pada properti-properti abstrak mereka, seperti masa, akselerasi, dan kecepatan. Bagi Adam Smith, warisan *Enlightenment* bangsa Skotlandia, demikian pula teman-temannya asal Inggris seperti David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan John Stuart Mill, itu berarti bahwa ekonomi secara konstan dan tetap merupakan sesuatu yang mendasari realitas untuk memahami perubahan dunia secara masif. Di sini, sesuatu yang penting yang dapat dibantah adalah penetapan konsep nilai dalam tenaga kerja produktif, pasar yang berangkat dari pandangan lama, bergantung pada fisiokrat, yakni bahwa kesejahteraan ekonomi secara literal berakar pada tanah (Mosco, 1996: 40). Fisiokrat adalah ekonom yang percaya bahwa kesejahteraan masyarakat hanya bisa dicapai melalui pertanian.

Ekonomi politik klasik Adam Smith dan rekan-rekannya sangat dipengaruhi oleh paradigma positivisme, yang ciri utamanya adalah antroposentrisme dan mengandalkan akal budi. Manusia adalah pusat yang berusaha keluar dari alam dan berusaha menjelaskan fenomena alam dengan menggunakan ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, dan kimia. *Cogito ergo sum* (saya berpikir maka saya ada) adalah adagium dianut oleh kaum Cartesian. Manusia sebagai makhluk berakal budi dan sebagai pusat, maka harus bebas dari tekanan apa pun untuk mengembangkan diri dan memahami dunia. Pemujaan terhadap individu ini yang kemudian oleh Smith dan pemikir ekonomi politik klasik lainnya dikembangkan menjadi sistem ekonomi liberal, yang terkenal dengan semboyan *laissez-faire*. *Laissez-faire* menghendaki sistem pasar bebas dan negara pun tidak boleh ikut campur dalam suatu sistem ekonomi.

Ekonomi politik klasik Smithian ini mendapatkan perimbangan gagasan secara signifikan dari kubu pendukung gagasan Marx yang menjadi embrio ekonomi politik berparadigma kritis. Sebagaimana layaknya sebuah perspektif yang mendapatkan serangan dari perspektif berbeda, maka ia berusaha melakukan pembenahan-pembenahan di dalam dan kemudian melahirkan pendukung baru. Inilah yang sering disebut sebagai ekonomi neoklasik, dengan tokoh-tokohnya antara lain yang terkemuka adalah David Ricardo dengan

“Hukum Imbalan Menurun”-nya; Alfred Marsall dengan Prinsip Marshall; dan JM Keynes, yang mewarisi dan mengembangkan gagasan Marshall, yang mengombinasikan peran negara dan swasta dalam perekonomian.

Ekonomi Politik Kritis

Perkembangan ekonomi politik berikutnya adalah apa yang dikenal sebagai ekonomi politik kritis yang membangun argumen-argumen fundamentalnya dengan bersumber dari gagasan Marx. Ekonomi politik berparadigma kritis ini menyerang argumen ekonomi politik klasik yang dianggap mengabaikan aspek kemanusiaan karena memuja rasionalitas dan moda produksi kapitalisme yang berorientasi pertumbuhan. Marx mengembangkan kritiknya yang berfokus pada moda produksi kapitalisme yang dianggap melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja. Meskipun demikian, dia sepakat dengan ekonomi politik klasik yang berfokus pada masalah kesetaraan, komunitas, dan tenaga kerja.

Juga harus diakui bahwa perintis ekonomi politik awal adalah Adam Smith yang merupakan suatu teori mengenai industri dan masyarakat kapitalis. Harus diakui pula bahwa ekonomi politik klasik ini mempunyai efek yang mendalam kepada Marx. Dia mempelajari ekonomi politik klasik ini dengan cermat dan sekaligus kritis terhadapnya. Namun, arah yang diambil oleh para ekonom dan sosiolog Inggris bukan arah yang diambil Marx. Ekonom dan sosiolog Inggris cenderung menerima ide Smith bahwa ada suatu “tangan yang tidak terlihat” yang membentuk pasar bagi tenaga kerja dan barang-barang. Pasar dilihat sebagai suatu realitas independen yang melampaui individu dan mengendalikan perilakunya. Para sosiolog Inggris, seperti para ekonom politis yang tidak seperti Marx, melihat pasar sebagai suatu daya positif, sebagai suatu sumber ketertiban, harmoni, dan integrasi di dalam masyarakat. Karena itu, mereka memahami pasar atau masyarakat pada umumnya secara positif, sehingga tugas sosiolog bukanlah mengkritik masyarakat,

melainkan hanya mengumpulkan data mengenai hukum-hukum yang mengaturnya. Tujuannya ialah memberikan fakta-fakta kepada pemerintah agar bisa digunakan untuk memahami cara kerja sebuah sistem dan mengarahkan cara kerjanya secara bijak (Ritzer, 2011: 55).

Marx mengembangkan sejumlah kontribusi teori klasik dalam analisis ekonomi. Dia sepakat bahwa tenaga kerja adalah sumber utama nilai, meskipun secara sistematis meninjau kembali gagasan itu untuk mengkaji divergensi antara nilai guna dan nilai tukar tenaga kerja untuk mengembangkan teori eksploitasi. Marx mengidentifikasi adanya perbedaan antara nilai dan harga tenaga kerja atau apa yang dia sebut sebagai nilai surplus yang dirampas oleh kapitalis sebagai hasil peningkatan kerja harian (eksploitasi mutlak) atau intensifikasi proses kerja selama hari kerja—disebut sebagai eksploitasi relatif (Mosco, 1996: 43).

Jadi, tampak jelas bahwa Marx setelah membaca secara saksama tesis-tesis yang dikemukakan oleh perintis ekonomi politik klasik, seperti Smith dan Ricardo. Dia kemudian memuji, tetapi sekaligus mengkritiknya. Marx memuji tesis ekonomi politik klasik bahwa tenaga kerja adalah sumber semua kekayaan. Namun, dengan fokus yang sama terhadap tenaga kerja sebagai objek analisis, Marx melakukan refleksi kritis atas praksis moda produksi kapitalisme dan secara cemerlang menemukan eksploitasi dan alienasi. Analisisnya yang canggih dan sedikit provokatif terhadap proses hubungan produksi dalam masyarakat kapitalis membuka mata dunia bahwa terjadi eksploitasi yang dirayakan oleh tenaga kerja itu sendiri. Ini yang luput dari pengamatan dan analisis Smith dan Ricardo.

Hal itulah yang kemudian membawa Marx kepada teori nilai kerja. Dalam hal ini dia berargumen bahwa keuntungan kaum kapitalis didasarkan pada eksploitasi tenaga kerja. Kaum kapitalis melakukan tipuan yang sederhana dengan membayar para pekerja kurang dari yang sepatasnya diterima. Sebab, mereka menerima bayaran yang kurang dibandingkan nilai yang benar-benar dihasilkan di dalam suatu periode kerja. Nilai surplus yang disimpan dan ditanamkan kembali oleh kaum kapitalis adalah dasar bagi seluruh sistem kapitalistis.

Sistem kapitalistis bertumbuh secara terus-menerus meningkatkan level eksploitasi terhadap tenaga kerja (dan dengan demikian meningkatkan jumlah nilai surplus) dan menanamkan keuntungan-keuntungan untuk perluasan sistem itu (Ritzer, 2011: 39).

Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, Marxis ortodoks yang menganut determinisme ekonomi itu mendapatkan kritik dari Mazhab Frankfurt yang juga dikenal sebagai pengikut teori budaya Marxis. Merespons ketidakpuasan terhadap determinisme ekonomi itu, Mazhab Frankfurt menekankan pentingnya kebudayaan sebagaimana dirintis oleh Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, dan Herbert Marcuse. Tidak satu pun yang mengingkari bahwa teori budaya Marxis adalah salah satu yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendekatan dan analisis ekonomi politik kebudayaan, meskipun tentu saja terdapat proses dialog secara kritis antara teoretikus satu dan lainnya dalam mengembangkan argumen dan konseptualisasinya. Argumen utamanya antara lain adalah bahwa ideologi tidak sekadar beroperasi pada ranah ekonomi politik seperti di pabrik-pabrik sebagaimana analisis Marx, tetapi beroperasi secara menyebar ke berbagai ranah kehidupan dalam praktik budaya sehari-hari.

Sebagaimana diungkapkan oleh Bryan S. Turner (2009), pergeseran kultural dalam teori sosial tampak sangat jelas. Marxisme Barat, secara umum, mencerminkan satu kecenderungan yang menjauh dari keasyikannya dalam berurusan dengan ekonomi politik semata dan kemudian lebih banyak mencurahkan perhatiannya kepada kebudayaan. Hal ini jelas terlihat, misalnya, dari karya-karya Antonio Gramsci, George Lukacs, Karl Korsch, dan Ernest Bloch serta generasi Marxis Barat yang muncul belakangan seperti Henri Lefebvre, Lucian Goldmann, dan Louis Althusser. Marxisme Barat yang menandai kembalinya mereka pada pemikiran-pemikiran Hegel—karena itu kerap disebut Marxisme Hegelian—merupakan respons terhadap gagalnya revolusi proletariat dan masa-masa sulit setelah Revolusi Rusia 1918. Kalau tulisan-tulisan Marx merupakan respons terhadap masa-masa setelah Revolusi Prancis 1789, Marxisme abad ke-20

merupakan refleksi nasib revolusi setelah 1918 dan munculnya nasionalisme serta fasisme di Eropa Barat. Perkembangan-perkembangan tersebutlah yang membuat orang mempertanyakan kembali proyek emansipasi modernitas (Turner, 2009: 22).

Konsep Marx yang merupakan kritik terhadap ekonomi politik klasik dengan berfokus pada tenaga kerja itu, meskipun dalam beberapa hal beririsan secara teoretis, secara prinsip masih jauh dari pendekatan dan analisis ekonomi politik kebudayaan. Bahkan, dalam beberapa hal, secara prinsip ia bertentangan dengan ekonomi politik kebudayaan, terutama yang berkaitan dengan determinisme ekonomi yang dikenal sebagai Marx ortodoks. Namun demikian, akar teoretis ekonomi politik kebudayaan tetap bersumber dari karya Marx, terutama yang berkaitan dengan kritik ideologi yang dijelaskan dengan konsep-konsep kesadaran palsu dan alienasi. Kritik ideologi itu menjadi salah satu rujukan dan konsep kunci dalam pendekatan ekonomi politik kebudayaan untuk menganalisis fenomena kebudayaan secara kritis.

Ekonomi Politik Kebudayaan

Untuk lebih mengenal apa itu ekonomi politik kebudayaan, diskusi ini akan berusaha memahami definisi, jejak-jejak teoretis, ciri-ciri utama, dan isu-isu yang sekiranya dapat diproblematisasi dari pendekatan dan analisis ekonomi politik kebudayaan. Tentu saja semua mengacu pada beberapa argumen teoretis sebelumnya dan berusaha mengontekstualisasikan dengan perkembangan isu kontemporer, baik pada level global maupun lokal sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Meskipun demikian, untuk memahami pengertiannya memang harus diakui bahwa perlu lebih hati-hati dan menuntut kecermatan dalam pembacaannya. Karena itu, upaya untuk memahami pengertiannya akan dilakukan dengan meminjam definisi dari beberapa teoretikus yang selama ini berfokus pada ekonomi politik kebudayaan, antara lain Biebyuck, Meltzer, Bob Jessop, Jacqueline Best, dan Matthew Paterson.

Pengertian Ekonomi Politik Kebudayaan

Ekonomi politik kebudayaan adalah pendekatan ekonomi politik yang memfokuskan pada sistem ekonomi dan komponen-komponennya, sebagai produk spesifik manusia, yang bersifat teknis dan memiliki hubungan-hubungan natural. Meskipun memiliki akar sejarah lebih panjang, ekonomi politik kebudayaan muncul sebagai bagian dari *cultural turn* dalam ilmu-ilmu sosial. Meskipun hal itu sering terlihat sebagai penolakan terhadap determinisme ekonomi dan penolakan terhadap kebudayaan yang menggunakan pendekatan konvensional dalam ekonomi politik, *cultural turn* tegas meninggalkan epistemologi positivistik dalam analisis sosial budaya. Untuk itu, ekonomi politik kebudayaan terus didefinisikan melalui variabel-variabel budaya dan pandangan dunia seperti identitas, gender, wacana, dan sebagainya, yang berarti berlawanan dengan ekonomi politik konvensional yang fokus pada dimensi material dan sistem budaya. Namun, penekanan terhadap dimensi nonmaterial dalam kehidupan ekonomi politik semakin menegaskan perbedaan antara kebudayaan dan material. Dalam perkembangan lebih lanjut, ekonomi politik kebudayaan meningkatkan orientasinya pada analisis ekonomi politik kritis terhadap fenomena perkembangan global yang cenderung menunjukkan gejala ekonomisasi budaya ke arah neoliberalisme. Seiring dengan ekonomisasi budaya dalam narasi perkembangan global, muncul fenomena kulturalisasi ekonomi. Di sini perhatian tidak sekadar ditujukan pada pertumbuhan industri budaya, tetapi pada berbagai cara kebudayaan dinormalisasi dalam wacana perkembangan korporasi global (Biebuyck dan Meltzer, 2010).

Sebagai contoh adalah tari Ramayana di Prambanan dan tari Barong di Bali yang mengalami ekonomisasi budaya akibat globalisasi. Dua tari itu sejatinya merupakan ekspresi lokalitas sebagai subjek aktif manusia berkehendak dalam relasinya dengan alam dan sesama manusia. Karena itu, tari Ramayana sebagai bagian ritual mistis hanya dilakukan pada momen bulan purnama dan demikian pula tari Barong yang hanya dilakukan setahun sekali. Namun, karena desakan dan tuntutan industri pariwisata yang mengglobal, maka dua tari sakral itu bisa dimainkan setiap saat menurut kehendak

wisatawan domestik maupun mancanegara. Implikasinya, dua tari sakral tersebut mengalami komodifikasi dan mengikuti kehendak mekanisme pasar industri pariwisata global, sehingga mengalami desakralisasi dan kehilangan spontanitasnya.

Sementara itu, kecenderungan kulturalisasi ekonomi terjadi ketika wacana pertumbuhan ekonomi, misalnya, mengalami pergeseran ke wacana budaya. Sebagai contoh, apa yang dilakukan oleh Raja Buthan Jigme Khesar Namgyel Wangchuk ketika mengkritik konsep *gross national product* (GNP) dalam pembangunan dan kemudian mengajukan konsep *gross national happiness* (GNH). Sebagai sebuah wacana tandingan, GNH terus menegosiasikan dan bahkan “mengganggu” wacana dominan GNP dalam pembangunan berorientasi pertumbuhan. GNH sebagai kekuatan lokalitas melakukan tindakan *political culture* terhadap ekonomi global yang kapitalistis dan neoliberalistis, dengan terus mendesak pentingnya hubungan harmonis manusia dengan alam dan sesama manusia sebagai sumber kebahagiaan.

Cultural turn itu sendiri merupakan gerakan yang dimulai pada awal dekade 1970-an oleh kalangan akademisi humaniora dan ilmu sosial yang membuat kebudayaan berfokus pada isu-isu perdebatan kontemporer. Istilah itu juga melukiskan adanya pergeseran tekanan ke arah makna-makna budaya dan berusaha menjauhkan diri dari epistemologi positivistik. Menurut Lynette Spillman dan Mark D. Jacobs (2005), *cultural turn* merupakan salah satu konsep yang paling berpengaruh terhadap humaniora dan ilmu sosial dalam generasi terakhir. Mengikuti argumen para sejarawan terkemuka, *cultural turn* mencakup berbagai teori baru yang datang dari arena pinggiran ke dalam ilmu sosial, khususnya pascastrukturalisme, *cultural studies*, kritisisme literasi, dan berbagai bentuk analisis linguistik yang menekankan kausalitas serta peran konstitutif dari proses-proses kultural dan sistem signifikansi (Steinmetz, 1999: 1–2).

Menurut Bob Jessop (2012), ekonomi politik kebudayaan secara konseptual sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena ia memiliki akar sejarah panjang sejak ekonomi politik klasik serta paham institusional lama dan berakar dari karya para akademisi Jerman

(*German Historical School*): Dalam 20–30 tahun terakhir telah muncul gerakan independen yang mengarah pada pendekatan baru yang disebut sebagai ekonomi politik kebudayaan. Pada hakikatnya, ekonomi politik kebudayaan mengadopsi *cultural turn* (yang memberi perhatian pada produksi makna) secara serius ke dalam kritik ekonomi politik. Ekonomi politik kebudayaan kemudian mencoba mengerjakan *cultural turn* tanpa kehilangan kontak dengan ekonomi politik kritis yang mempelajari tentang ciri-ciri basis material kapitalisme, fondasi-fondasi kontradiksi kapitalisme, kecenderungan krisis kapitalisme, dan dinamika akumulasi diferensialnya. Dalam pengertian ini, ekonomi politik kebudayaan sebagai pendekatan dan analisis menggunakan kombinasi antara “sosiologi ekonomi lunak”, yang menekankan pada ketertanaman sosial (*social embeddedness*) serta sifat-sifat konstruktivistis aktivitas ekonomi, dan “ekonomi politik keras”, yang menekankan pada kategori ekonomi secara natural dan “hukum gerak” yang berorientasi pada keuntungan serta ekonomi pasar. Dengan mengembangkan konsep-konsep jalan tengah tersebut, perbedaan ekonomi politik kebudayaan dengan pendekatan ekonomi politik lainnya dapat dikenali pada teknik analisis semiotik dan artikulasi mereka yang radikal, serta kritik ekonomi politik yang heterodoks. Dalam pengertian ini, ekonomi politik kebudayaan dapat dikatakan sebagai pendekatan yang memberi kontribusi pada ekonomi heterodoks dan, dengan demikian, ia sangat bergantung pada kerja inovatif yang tercakup dalam ekonomi heterodoks. Dengan penjelasan itu, Jessop bermaksud menghindari sangkaan bahwa ekonomi politik kebudayaan adalah eklektisisme dan fragmentasi (Jessop, 2012).⁹

Lebih lanjut, menurut Bob Jessop, terdapat tiga ciri utama yang secara teoretis membedakan ekonomi politik kebudayaan dengan ekonomi konvensional ataupun ekonomi politik lainnya. *Pertama*, dibandingkan dengan ekonomi politik lain—dan berbeda dengan studi umum tentang semiotika—dalam evolusinya, ekonomi politik kebudayaan melawan analisis transhistoris, yang menuntut penjelasan

sejarah maupun masalah institusi dalam dinamika ekonomi dan politik. *Kedua*, ia berbeda dengan perkembangan disiplin lain dan ekonomi politik institusional, tetapi memiliki kesamaan dengan beberapa varian materialisme kultural yang menekankan pada *cultural turn* secara serius, terutama yang memberi perhatian pada hubungan-hubungan kompleks antara makna dan praktik. *Ketiga*, dalam posisi berlawanan dengan tradisi lain, ekonomi politik kebudayaan berusaha mengombinasikan evolusi ekonomi politik institusional dengan *cultural turn*. Pendekatan ini mengeksplorasi hubungan-hubungan kompleks dalam tiga istilah umum mekanisme evolusi, yaitu variasi, seleksi, dan retensi (Campbell, 1959). Ia merupakan refleksi dalam perhatiannya terhadap proses semiotika koevolusi serta ekstrasemiotika dan pengaruhnya dalam susunan formasi-formasi sosial kapitalis. Pendekatan ekonomi politik ini menurut Jessop secara umum dapat dipahami secara konseptual melalui empat perspektif utama, yaitu secara ontologis, epistemologis, metodologis, dan secara substantif, yang secara rinci dapat disimak dalam paparan berikut ini.

Secara ontologis, ekonomi politik kebudayaan mengklaim bahwa semiotika memberikan kontribusi pada semua susunan berbagai objek sosial spesifik dan subjek-subjek sosial serta, *a fortiori*, pada proses *co-constitution* dan *co-evolution* dalam sistem hubungan sosial. Ekonomi politik ortodoks cenderung menaturalkan dan mereifikasi objek teoretisnya (seperti tanah, mesin-mesin, pembagian kerja, uang, komoditas, informasi ekonomi) serta menyodorkan kelemahan subjek-subjek dan subjektivitas dibentuk, juga perbedaan moda kalkulasi yang diinstitusionalisasi dan dimodifikasi. Sebaliknya, ekonomi politik kebudayaan memandang teknik dan objek-objek ekonomi dikonstruksi secara sosial, historis, dan mengikuti prinsip tertanam (*embedded*) atau tercerabut (*disembedded*) dalam jaringan hubungan sosial yang lebih luas maupun institusional yang mewujud dalam korporasi, serta memerlukan usaha “perbaikan” sosial secara kontinu terhadap reproduksinya. Konstruksi sosial itu tentu saja juga meliputi elemen-elemen material, meski diartikulasikan dengan cara berbeda melalui intervensi praktik semiotika. Secara analogis,

⁹ Wawancara dengan Bob Jessop oleh Agnes Labrousse dan Thomas Lamarche. Lihat <http://journals.openedition.org>.

pendekatan dan analisis ekonomi politik kebudayaan seperti itu dapat diterapkan untuk menganalisis negara dan politik (Jessop, 1990, 2002; Mitchell, 1991).

Secara epistemologis, ekonomi politik kebudayaan mengkritik kategori-kategori dan metode tipikal ekonomi politik ortodoks, menekankan keharusan kontekstual dan historisitas pengetahuan. Ia menolak berbagai pandangan universalistis dan pandangan positivistik terhadap realitas, menyangkal penetapan dualitas subjek-objek, dan menjauhkan diri dari pendekatan reduksionistis analisis ekonomi. Lebih jauh, ekonomi politik kebudayaan juga menekankan materialitas hubungan-hubungan sosial dan tegas menolak dilibatkan dalam proses yang menerapkan "*behind the backs*" dari agen-agen yang relevan. Ekonomi politik kebudayaan secara khusus memberi perhatian pada perangkat sosial dan dinamikanya yang merupakan produk dari interaksi sosial material tersebut. Karena itu, pendekatan ini berusaha meninggalkan sosiologi konstruksionisme sosial murni maupun volunteris kosong kubu tertentu yang menyatakan bahwa agen akan dapat melakukan apa pun dalam keberadaannya melalui artikulasi wacana. Singkatnya, ekonomi politik kebudayaan mengakui peran konstitutif semiotika dan kemunculan karakter ekstrasemiotika dari relasi-relasi sosial serta pengaruhnya pada kemampuan melakukan tindakan dan transformasi.

Secara metodologis, ekonomi politik kebudayaan menggabungkan konsep dan instrumen analisis semiotika kritis dan ekonomi politik kritis. *Cultural turn* meliputi pendekatan yang berorientasi pada argumentasi, tingkat narasi, retorika, hermeneutika, identitas, reflektivitas, historisitas, dan wacana. Terhadap semua orientasi *cultural turn* itu, Jessop menggunakan semiotika produksi makna intersubjektif yang mencakup semua hal tersebut. Untuk semua asumsi semiotik tersebut, secara kausalitas dianggap bermakna dan bahwa peristiwa-peristiwa aktual, proses, dan efek yang ditimbulkannya tidak saja dapat diinterpretasi, tetapi juga dapat dijelaskan, paling tidak sebagian, ke dalam istilah semiotika. Dengan demikian, ekonomi politik kebudayaan menguji peran *semiosis* dan praktik semiotik tidak hanya dalam (*re*)making relasi sosial secara terus-menerus,

tetapi juga dalam kemunculan sesaat, konsolidasi sesaat, dan realisasi yang sedang berjalan dari perangkat ekstrasemiotika. Masih secara metodologis, ada beberapa varian dalam *cultural turn* yang menyebabkan ekonomi politik yang hingga fase perkembangannya sekarang masih mempunyai perbedaan. Pendekatan ekonomi politik Jessop sendiri pada prinsipnya tetap mengikuti tradisi Marxis. Ini menguji secara spesifik bentuk-bentuk dasar, kontradiksi-kontradiksi, dilema kapitalisme, kondisi eksistensi, dan pengaruh potensial mereka pada hubungan-hubungan sosial lain. Namun, bertolak belakang dengan Marxisme ortodoks, seperti ekonomi ortodoks, yang cenderung mereifikasi dan esensial terhadap momen-momen perbedaan akumulasi kapital yang memperlakukan mereka sebagai kekuatan objektif, ekonomi politik kebudayaan yang terinspirasi oleh Marxis menekankan kontingensi dan selalu bertendensi natural. Jika fenomena sosial secara diskursif adalah konstitutif dan tidak pernah mengarah pada reproduksi sendiri dan terisolasi dari fenomena sosial lainnya, kemudian muncul kebutuhan akan perangkat yang diperlukan untuk menganalisis objek dalam hubungan-hubungan internal. Perangkat-perangkat demikian hanya akan menjadi konkret jika objek sepenuhnya konstitutif dan secara terus-menerus direproduksi secara diskursif dalam praktik sosial. Sebagai contoh, hubungan-hubungan kapitalis selalu terlihat berkaitan dengan hubungan-hubungan produksi lainnya dan senantiasa dominan, terlebih lagi operasi mereka selalu rentan pada disrupsi melalui kontradiksi internal, kekacauan hubungan-hubungan berpusat pada tertib institusional lain dan dunia kehidupan (masyarakat sipil), dan penolakannya berakar pada konflik-konflik kepentingan, kontestasi identitas, dan moda-moda kalkulasi. Tampilannya cenderung formal dan/atau secara substantif merupakan kesatuan relasi kapital, dalam arti bahwa senantiasa terdapat tendensi inheren dalam kapitalisme, yaitu bergantung pada reproduksi secara terus-menerus dalam hubungan kapital itu sendiri. Dikombinasikan dengan ekonomi politik kritis dan analisis semiotik kritis, ekonomi politik kebudayaan banyak menyuguhkan eksplorasi tentang dinamika tendensi-tendensi tersebut (Jessop, 2001).

Secara substantif, sebagaimana dipahami secara keliru oleh ekonomi ortodoks, ekonomi politik kebudayaan hanya sebagai level makro. Ekonomi politik kebudayaan memang berbeda dengan eksistensi ekonomi secara aktual sebagai sejumlah aktivitas ekonomi konvensional. Totalitas aktivitas ekonomi begitu tak terstruktur dan kompleks, sehingga tidak bisa hanya menjadi objek yang dikalkulasi, dikelola, diatur, atau dipandu. Praktik demikian selalu berorientasi pada relasi-relasi ekonomi (sistem atau subsistem ekonomi) yang telah secara diskursif dan institusional tetap merupakan objek intervensi. Keterlibatan "imajinasi-imajinasi ekonomi" yang terkait dengan semiotika mengatur gugusan ekonomi itu. Lebih jauh, jika hal itu membuktikan lebih dari *arbitrary*, rasionalistis, dan kemauan (Gramsci, 1971: 376–377), imajinasi-imajinasi ini harus memiliki sesuatu yang signifikan, merujuk pada korespondensi, pada interdependensi material konkret dalam situasi ekonomi saat ini dan/atau dalam relasi antara ekonomi dan aktivitas ekstraekonomi. Seperangkat pemahaman ini selalu didefinisikan secara selektif, yang membatasi pemahaman terhadap kapasitas kognitif dan diskursif, epistemologi basis material, dan berbagai paradigma ekonomi. Model pemahaman ini secara tipikal mengeluarkan elemen-elemen—biasanya tak secara intensional—bahwa adalah vital menampilkan kiprah relasi-relasi ekonomi (dan ekstraekonomi) yang telah teridentifikasi secara keseluruhan.

Jessop bersama Ngai-Ling Sum (2013), mengeksplorasinya secara lebih luas dan mendalam dengan mendefinisikan ekonomi politik kebudayaan sebagai pendekatan analitis yang mencoba menyintesis kontribusi dari ekonomi politik kritis dan analisis wacana kritis dalam ranah studi kebijakan (Jessop, 2004; Sum dan Jessop, 2013). Itu merupakan pokok gagasan yang relevan dengan dimensi budaya (dipahami sebagai *semiosis* atau produksi makna) dalam interpretasi dan penjelasan terhadap formasi-formasi kompleks seperti kebijakan. Pendekatan ekonomi kebudayaan merujuk pada fakta bahwa kebijakan-kebijakan kultural selalu merupakan interpretasi reflektif secara selektif terhadap interpretasi problem-problem, penjelasan sebab-sebabnya, dan berbagai solusi preventif.

Para pembuat keputusan dan aktor kebijakan pada umumnya membutuhkan secara selektif atribut makna suatu aspek dunia, mendorong adanya interpretasi terhadap problem secara lebih dini dan penyelesaian yang pas dalam proses pengambilan keputusan. Ekonomi politik kebudayaan telah memiliki kepentingan dalam studi interpretasi (wacana kebijakan, imajinasi-imajinasi ekonomi dan politik) yang diterjemahkan ke dalam strategi dan proyek hegemonik serta institusionalisasi ke dalam struktur dan praktik-praktik spesifik. Kontribusi utama pendekatan ekonomi politik kebudayaan terhadap analisis kebijakan adalah kebutuhan untuk mengambil secara serius mobilisasi ide-ide kebijakan dan persepsi aktor politik dalam penjelasan dinamika kebijakan pendidikan dan hasil-hasil kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah perhatian khusus pada peran seperangkat kebijakan aktor (penasihat kebijakan, konsultan, dan staf ahli) serta mekanisme persuasi dan konstruksi makna (kekuasaan lunak) yang mereka gunakan untuk memengaruhi persepsi aktor-aktor lain. Menurut Bob Jessop (2010), seluruh transformasi institusional dapat dijelaskan interaksi faktor-faktor materialnya dan dijelaskan secara semiotik melalui mekanisme evaluasi terhadap variasi, seleksi, dan retensi.¹⁰

Karakteristik Ekonomi Politik Kebudayaan

Mengacu pada beberapa definisi tentang ekonomi politik kebudayaan sebagaimana diuraikan terdahulu, terdapat beberapa karakteristik yang bisa diidentifikasi. Sebagai pendekatan kritis, ekonomi politik kebudayaan memiliki karakteristik antara lain multidisiplin,

¹⁰ Variasi merujuk pada proses bahwa wacana atau praktik kebijakan pendidikan yang dominan perlu direvisi karena munculnya narasi baru yang mempersoalkan proses pendidikan yang sedang menghadapi tantangan eksternal (misalnya krisis ekonomi) maupun internal (misalnya putus sekolah). Seleksi menyiratkan identifikasi terhadap interpretasi paling cocok terhadap masalah-masalah yang sudah ada untuk memberi solusi kebijakan yang paling komplementer. Solusi-solusi ini cenderung bervariasi antara negara satu dan lainnya karena struktur ekonomi politik dan ideologi tertentu. Akhirnya, retensi membutuhkan pelembagaan kebijakan-kebijakan baru melalui keterbukaannya ke dalam kerangka peraturan dan teknologi tata kelola; pemberlakuannya melalui penafsiran ulang dengan mekanisme penerimaan dan penolakan dari pelaksana dan praktisi di berbagai tingkat.

kelekatan, konstruktivisme budaya, perhatian pada produksi makna dan wacana, serta perhatian pada isu kebudayaan global.

Multidisiplin adalah salah satu pendekatan terbuka dan inklusif, sehingga menghindari determinisme yang berpotensi menampakkan watak dominasinya. Karena itu, pendekatan ekonomi politik budaya sejak awal memang menjauhkan diri dari paradigma positivistik dan sekaligus tidak sejalan dengan Marxisme ortodoks yang menganut determinisme ekonomi. Dengan kata lain, karakter utama ekonomi politik kebudayaan adalah pendekatan multidisiplin, dan, karena itu, menolak mentah-mentah pendekatan deterministik. Eksklusivitas sebuah disiplin, misalnya ilmu ekonomi yang merasa terpisah dari disiplin lain dan secara jemawa mengklaim mampu memberikan penjelasan terhadap dunia sosial, menjadi sasaran utama kritik ekonomi politik kebudayaan. Konsekuensi logis atas posisinya yang nondeterministik itu membuat landasan teoretis ekonomi politik bisa dilacak dari pendekatan yang menekankan ketertanaman (*embeddedness*) ekonomi. Karena itu, menjadi relevan untuk melacak jejak teoretisnya yang bersumber dari Karl Polanyi (1994).

Karl Polanyi dikenal karena menentang pemikiran ekonomi tradisional dan ekonomi arus utama yang berorientasi pada pasar bebas dalam bukunya yang terkenal, *The Great Transformation* (1994). Polanyi saat ini dikenang sebagai pencetus substantivisme, yaitu sebuah pendekatan budaya terhadap ekonomi yang mempelajari cara ekonomi tertanam (*embedded*) dalam masyarakat dan kebudayaan. Pandangan ini berlawanan dengan ekonomi arus utama, tetapi populer di bidang antropologi, sejarah ekonomi, sosiologi ekonomi, dan ilmu politik.

Menurut Polanyi, ekonomi arus utama mengabaikan dimensi kultural dan moral, karena terlalu percaya diri dan memisahkan ekonomi dari dimensi lain. Dia menyebut ekonomi seperti itu sebagai ekonomi formalistik, di mana ekonomi merupakan entitas terpisah yang tidak memiliki dimensi lain, seperti dimensi sosial dan budaya. Sebagaimana dikutip oleh Best dan Paterson (2014), bagi Polanyi, sebelum kehadiran ekonomi pasar, praktik ekonomi sebenarnya secara dekat terhubung dengan norma-norma sosial, diorganisasi

dengan prinsip resiprositas, redistribusi, dan produksi *subsistence*. Namun, begitu lahir ekonomi pasar yang mengatur dirinya sendiri, praktik-praktik tradisional tersebut tercerabut dari akar sosialnya dan kemudian mengikuti logika ekonomi pasar. Akibatnya, ekonomi tercerabut (*disembedded*) dengan akar sosial budayanya, sehingga ekonomi kurang bermoral dan tampil formalistik.

Karya Polanyi sampai sekarang pun masih menjadi fondasi teoretis dan konseptual dalam ekonomi politik kebudayaan. Proyek teoretisnya yang tidak kenal lelah mengkritik praktik ekonomi pasar yang kapitalistik terus menjadi sumber inspirasi bagi kajian kritis, baik pada bidang ekonomi politik kebudayaan maupun sosiologi ekonomi yang menolak ketidaktertanaman ekonomi terhadap praktik sosial budaya. Sebenarnya, tidak hanya Polanyi yang memiliki argumen terintegrasinya ekonomi dengan dimensi lainnya, karena dalam sosiologi ekonomi juga sudah menyuarakan pandangan senada.

Sebut saja para sosiolog terkemuka itu antara lain Emile Durkheim, Max Weber, George Simmel, dan tentu saja Karl Marx, yang meskipun pada awalnya menganut determinisme ekonomi, pandangan filosofisnya tetap mengandung inklusivitas. Tentu saja mereka adalah para perintis atau dikenal sebagai sosiolog klasik yang asumsi-asumsi teoretisnya berangkat dari dinamika perkembangan masyarakat waktu itu yang disebut sebagai kapitalisme awal. Namun, di antara para penerusnya, yang mendasarkan diri dan berusaha mengembangkannya juga terus muncul, seperti Joseph Schumpeter, Karl Polanyi, dan kemudian Mark Granovetter yang memopulerkan gagasan Polanyi tentang ekonomi yang melekat atau ketertanaman dalam struktur sosial.

Meskipun lebih tertarik pada topik-topik seperti moralitas dan agama dibandingkan ekonomi, Durkheim juga menulis *The Division of Labor* (1984), yang berpendapat bahwa pengaruh sosial terhadap ekonomi pertukaran modern sama pentingnya dengan pengaruh ekonomi itu sendiri. Sementara pendapat Simmel (1990) juga senada sebagaimana dituangkan dalam *The Philosophy of Money*, yakni bahwa pengaruh kultural uang setara dengan pengaruh ekonominya (Swedberg, 2011: 616). Tentu saja juga karya Weber (1958), *The*

Protestan Ethic and The Spirit of Capitalism, yang menawarkan asumsi tentang pandangan kultural dan keagamaan Calvinisme sebagai faktor penting terhadap kemunculan masyarakat kapitalis di Amerika Serikat.

Karakter kedua ekonomi politik kebudayaan adalah konseptualisasinya terhadap kebudayaan yang tidak mengikuti argumen esensialisme budaya, tetapi lebih pada konstruktivisme budaya. Itu juga merupakan konsekuensi atas posisinya yang tidak deterministik dan positivistik, serta menolak budaya sebagai faktor yang menentukan tindakan aktor yang dianggap pasif. Sebaliknya, dalam pandangan ekonomi politik kebudayaan, manusia adalah aktor kreatif yang terus mengonstruksi dan memproduksi makna-makna budaya.

Asumsi kaum esensialis meyakini bahwa kebudayaan terdiri dari nilai-nilai dan norma-norma yang telah selesai, mantap, baku, dan berdiri sendiri. Dalam pandangan mereka, tingkah laku sekelompok orang akan bergantung kepada nilai-nilai dan norma-norma kebudayaan yang dianutnya. Jadi, untuk mengubah tingkah laku budaya, perlu diubah terlebih dahulu seluruh perangkat nilai dan norma kebudayaan yang menjadi pedoman bagi tingkah laku budaya. Salah satu ungkapan yang khas dari kaum esensialisme budaya ini adalah "jangan salahkan kebudayaan, tetapi salahkan orangnya". Kalau ada yang menyimpang dalam kebudayaan, yang harus diubah adalah tingkah laku budaya, bukan nilai dan norma-norma kebudayaannya. Dalam pandangan mereka, sistem dan norma itu sudah baku, tidak bisa diubah, sehingga jika ada fenomena penyimpangan, tingkah laku manusia dianggap sebagai menyimpang dari sistem nilai dan norma yang berlaku.

Di Indonesia, asumsi-asumsi esensialisme ini sangat berpengaruh dalam ilmu-ilmu sosial. Dominannya pengaruh ini tidak lepas dari pemujaan ilmu sosial terhadap positivistik (Kleden, 1986: 4). Paham ini memandang kebudayaan sebagai *given*, barang jadi yang bisa diteliti secara empiris gejala-gejala dan pola-polanya. Positivisme hanya sanggup menangkap kehadiran sebuah kebudayaan dengan pola-pola sebagaimana sudah terbentuk, tetapi kurang dapat menangkap proses pembentukan kebudayaan itu.

Barangkali, sangat bisa dimengerti mengenai faktor yang membuat ilmu sosial di Indonesia memahami kebudayaan sebagai suatu sistem ide, sistem tingkah laku, dan perwujudan benda-benda budaya.¹¹ Di sini yang khas adalah bahwa baik ide, tingkah laku, maupun benda-benda material akan dipandang pertama-tama sebagai produk. Jadi, ide yang diteliti adalah ide yang sudah terbentuk pada suatu kelompok etnis; misalnya, tingkah laku yang dimaksud adalah sistem interaksi yang sudah dimantapkan dan bahkan dilembagakan dan kebudayaan material yang diperhatikan adalah ciptaan berupa benda-benda fisik yang sudah jadi. Dengan kata lain, ilmu sosial dalam melihat kebudayaan hanya sebagai sebuah "kata benda" (Kleden, 1986: 167).

Berimpit dengan konsepsi esensialisme budaya itu, maka dalam beberapa dekade, pemahaman terhadap konsep kebudayaan di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural Parsonian. Menurut Talcott Parsons, kebudayaan adalah sistem simbol yang terpola dan tertata yang merupakan sasaran orientasi aktor, aspek sistem kepribadian yang diinternalisasi, dan pola-pola yang terinstitutionalkan dalam sistem sosial (Parsons, 1990). Karena pada dasarnya kebudayaan bersifat simbolis dan subjektif, maka ia (kebudayaan) selalu diajarkan dari satu sistem ke sistem lainnya. Kebudayaan dapat bergerak dari satu sistem ke sistem lainnya dengan cara berdifusi dan dari satu sistem kepribadian menuju sistem kepribadian lain melalui pembelajaran dan sosialisasi. Namun, karakter simbolis (subjektif) kebudayaan juga memberinya ciri lain, yaitu kemampuan untuk mengontrol sistem tindakan lain yang dikemukakan Parsons. Inilah alasan Parsons melihat dirinya sebagai penganut determinisme kultural (Ritzer, 2004: 263). Senada dengan Parsons, Robert K. Merton (1968) mendefinisikan kebudayaan sebagai "serangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang diberlakukan sama kepada seluruh anggota masyarakat atau kelompok tertentu" dan struktur sosial didefinisikan sebagai

11 Konsepsi kebudayaan seperti ini sangat dominan dalam Koentjaraningrat dan selama ini banyak berpengaruh pada kalangan akademisi. Uraian Koentjaraningrat tentang kebudayaan Jawa juga sulit menghindar dari karakter esensial. Lihat, misalnya, *Kebudayaan Jawa, Seri Emografi Indonesia No. 2*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

“serangkaian hubungan sosial teratur yang memengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan satu atau lain cara” (dalam Ritzer, 2004: 273). Erat kaitannya dengan pandangan ini adalah konsepsi budaya yang dirumuskan oleh Koentjaraningrat, di mana budaya dipandang sebagai sebuah sistem nilai yang bersifat tetap. Karena itu, budaya Jawa pun sering dipahami secara esensial, sehingga program dan kebijakan yang diterapkan adalah bagaimana melestarikan budaya itu.

Sementara itu, konsepsi kebudayaan yang antiesensialisme berasumsi sebaliknya, yakni bahwa bukan hanya kebudayaan yang membentuk sifat orang dan masyarakatnya, melainkan pendukung suatu kebudayaan secara aktif memberi bentuk dan isi kepada kebudayaan mereka. Kebudayaan tidak cukup dipandang sebagai nilai dan norma, tetapi dapat dan harus juga dipandang sebagai wacana, yaitu sebagai hasil bentukan dan hasil konstruksi sosial dari sekelompok orang dalam mencari orientasi kepada lingkungan hidupnya. Dengan kata lain, konsepsi bahwa manusia dibentuk oleh kebudayaan kini diimbangi secara meyakinkan oleh konsepsi lain bahwa kebudayaan juga dibentuk oleh para pendukungnya. Dalam perspektif teori agensi, subjek ternyata ada yang mampu menjadi agen perubahan, yang bisa menawarkan konstruksi baru yang mengubah kebudayaan yang telah mapan.

Erat kaitannya dengan paham ini, sebagaimana dikatakan Kleden (1996), adalah pemahaman bahwa kebudayaan bukan sebagai kata benda, melainkan kebudayaan sebagai kata kerja. Asumsinya bahwa kebudayaan merupakan suatu proses dan bukan saja sebagai produk. Tiap kebudayaan mempunyai kebutuhan untuk menentang perubahan dan mempertahankan identitas, sekaligus mempunyai kebutuhan untuk menerima perubahan dan mengembangkan identitasnya lebih lanjut melalui agen-agenya.

Ekonomi politik kebudayaan lebih mendukung argumen konstruktivisme dan antiesensialisme budaya, serta menolak esensialisme budaya dan epistemologi positivistik dalam konseptualisasi kebudayaan. Sebagaimana dikatakan oleh Best dan Paterson (2010), ekonomi politik kebudayaan memahami budaya dalam analisisnya

terhadap isu budaya global, kebudayaan sebagai identitas dan perbedaan, sebagai jaringan makna, dan budaya sebagai material.

Sementara itu, pandangan sosiologi kebudayaan memahami budaya sebagai penanda dan petandanya, gerak tubuh dan interpretasinya, makna yang disengaja dan tidak disengaja, wacana tertulis dan tuturan yang efektif, pembingkai situasional dan paradigma ilmiah, cita-cita moral dan politis, dan sebagainya. Metodologi untuk mempelajari budaya diyakini amat beragam dan termasuk survei terhadap sikap dan kepercayaan, observasi partisipan, etnografi, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, analisis tekstual tentang media visual dan tertulis, serta analisis pembicaraan. Namun demikian, pada akhirnya semua metode ini memerlukan interpretasi makna, sehingga tidak dapat dipetakan langsung dari metode ilmu-ilmu pengetahuan alam, meskipun sejauh mana metode-metode ilmiah dapat digunakan pada penelitian tentang budaya merupakan suatu perdebatan yang signifikan (Reed dan Alexander, 2011: 645).

Pemahaman terhadap budaya secara kritis itu kemudian menempatkan ekonomi politik kebudayaan bersinggungan dengan perspektif teori sosial kritis, khususnya Marxis Barat dan pascastrukturalis. Konsekuensinya, pretensi humaniora tentang budaya dan penciptaan karya sastra, drama, dan musik yang juga menyertainya ditampilkan sebagai alat-alat pengasingan sosial dan penguatan hierarki. Selain itu, dengan meneliti secara saksama estetika artefak budaya populer dan kegiatan kultural kreatif yang dilakukan kelas, ras, dan gender yang diasingkan secara tradisional dari lingkup produksi dan apresiasi seni adiluhung, ekonomi politik kebudayaan dan sosiologi kebudayaan telah berperan penting dalam dekonstruksi mengenai tipologi budaya kelas tinggi/menengah/rendah.

Begitulah, posisinya yang seperti itu kemudian menjadikan ekonomi politik kebudayaan berdekatan dan banyak memiliki irisan dengan *cultural studies*. Konseptualisasi ekonomi politik kebudayaan terhadap kebudayaan yang diskursif, cair, dan dinamis itu juga berimpit dengan konseptualisasi yang diajukan oleh sosiologi kebudayaan. Karakter ini kemudian mendorong pendekatan dan analisis ekonomi kebudayaan peka terhadap berbagai isu ketidakadilan dan

sekaligus isu identitas yang belakangan ini marak di berbagai belahan dunia.

Karakter ketiga terkait dengan isu globalisasi, karena fakta menunjukkan bahwa, ketika budaya telah mengalami globalisasi dan menembus batas-batas teritorial negara dan nasionalisme, bersamaan dengan itu muncul fenomena kapitalisme global di dalam konstelasi politik dan ekonomi dunia secara signifikan. Karya Polanyi juga masih memiliki relevansi, karena sejak awal kritiknya tertuju pada ekonomi, terutama perhatiannya terhadap liberalisme ekonomi pasar yang memiliki regulasi sendiri atau tanpa regulasi maupun pada keuntungan pribadi yang dipakainya sebagai dasar dari semuanya. Sebagian kritik kontemporer terhadap neoliberalisme, terutama dalam kaitannya dengan perekonomian, berakar pada karya Polanyi (Ritzer, 2009: 1.022).

Fakta juga menunjukkan bahwa sekarang ini revolusi neoliberal dalam ilmu-ilmu ekonomi telah menghasilkan masyarakat yang semakin tergantung pada mekanisme pasar ketimbang modal sosial (*social capital*) dan kepercayaan (*trust*), serta lebih mengutamakan individualisme ketimbang solusi kolektif dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Banyak lembaga publik mengalami kemunduran—universitas-universitas negeri, perpustakaan-perpustakaan umum, siaran-siaran pemerintah, sistem-sistem kesehatan masyarakat, transportasi massa, dan sebagainya—hingga melahirkan masyarakat yang lebih bergantung pada badan-badan swadaya dan dana-dana derma ketimbang bergantung pada negara (Turner, 2011: xxxix).

Kecenderungan neoliberalisme yang mengatur dirinya sendiri dan bahkan tidak mau diatur, atau dikenal pula sebagai *swatata* ekonomi, menyebabkan dominasi kapitalisme semakin menggurita dan nyaris tak tersentuh. Jelas ini menjadi kegelisahan ekonomi politik kebudayaan yang berfokus terhadap globalisasi budaya, yang perlu dikaji secara kritis. Dengan demikian, ekonomi politik kebudayaan menawarkan peranti analisis yang tajam dengan membongkar klaim alamiah sistem ekonomi pasar *swatata* sekaligus memberikan senjata untuk memulihkan kehidupan sosial dan kemanusiaan melalui

dekomodifikasi. Implikasinya, kehadiran institusi nonpasar adalah sebuah imperatif atau sebuah keniscayaan.

Sementara itu, melalui buku berjudul *Cultural Political Economy*, secara panjang lebar Jacqueline dan Matthew Paterson (2010; editor) menjelaskan dalam sebuah kata pengantar di bawah subjudul “Understanding Cultural Political Economy”, bahwa ekonomi politik kebudayaan dewasa ini mau tidak mau harus mengaitkannya dengan isu kebudayaan dalam konteks global. Dalam perkembangan lebih lanjut, ekonomi politik kebudayaan itu sendiri mengikuti perkembangan ekonomi dan politik global. Ketika dunia semakin menjadi satu kesatuan global baik secara ekonomi, politik, dan kebudayaan, maka penjelasan teoretis atas fenomena baru itu pun juga mendapat perhatian intensif dari ekonomi politik kebudayaan. Ini berarti bahwa ekonomi politik kebudayaan terus mengembangkan analisisnya terhadap isu global yang memang sudah menjadi imperatif atau keniscayaan.

Lebih lanjut, Best dan Paterson (2010) menjelaskan bahwa karakter kultural ekonomi politik kontemporer secara jelas adalah global, baik situasi baru itu mengandung seperangkat makna telah menembus secara global yang memungkinkan strategi pemasaran beroperasi di mana saja maupun berbagai budaya manajemen spesifik telah mengglobal melalui strategi firma seperti HSBC. Penekanan pada politik dan global yang mendapat kajian dari berbagai latar belakang disiplin paling banyak memberikan kontribusi pada buku yang diedit oleh Best dan Paterson ini. Namun sayangnya, menurut Best dan Paterson, debat dalam ilmu politik, khususnya dalam Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional, telah gagal menggalakkan literatur ekonomi kultural ini.

Pada sisi lain, menurut Best dan Paterson (2010), terdapat literatur kritis yang melimpah dan canggih dalam ekonomi politik internasional untuk secara penuh mendorong dengan pertanyaan kultural dalam kaitannya dengan konsep, analisis, dan problem-problem internasional. Sebagai contoh, konstruktivis dalam ekonomi politik internasional (Blyth, 2002; McNamara, 1998) dan konstruktivis dalam hubungan internasional juga telah menggunakan secara luas pada

ekonomi, tetapi masih cenderung dipersempit pada kultur sebagai ide atau norma-norma. Juga banyak literatur yang menggunakan peran budaya organisasional yang menjelaskan organisasi internasional, tetapi masih menggunakan perspektif kultur sebagai norma-norma (Barnett dan Finnemore, 2004; Weaver dan Leiterritz, 2005; Park, 2006). Meskipun studi-studi tersebut menggunakan studi etnografi tentang institusi-institusi seperti IMF dan Bank Dunia, mereka masih berfokus terutama pada norma-norma dan ide, yang mengabaikan peran kebiasaan dan praktik; lebih dari itu, meskipun mengembangkan wawasan budaya ke dalam kultur lembaga-lembaga ekonomi, mereka tidak mengambil langkah krusial dan kemudian berusaha menguji institusi kultural ekonomi secara lebih luas. Penekanan Best dan Paterson pada cara-cara di mana kultur berimplikasi dalam praktik ekonomi sehari-hari juga secara jelas memberi kontribusi untuk mengembangkan literatur pada politik sehari-hari dari ekonomi politik internasional (Hobson dan Seabrooke, 2007; Harnes, 2001; Langley, 2008).

Pada saat yang sama, dengan menekankan karakter budaya pada praktik kehidupan sehari-hari itu, Best dan Peterson juga berharap mendalami fondasi teoretis analisis demikian. Akhirnya, neo-Gramscian dan Marxis lain (Jessop dan Sum, 2001; Cox, 1987; Gill, 1995) telah menyodorkan analisis hegemonik dalam politik global, membuka ruang untuk menganalisis tentang kondisi kultural kapitalisme. Namun, penekanan mereka secara kontinu terhadap kelas telah cenderung mengurangi pertanyaan kultural pada satu cara di mana dominasi kapitalisme direproduksi dan ditolak; ini masih satu kemungkinan jawaban atas pertanyaan ekonomi politik kebudayaan, tetapi Best dan Paterson ingin meninggalkan kemungkinan lebih banyak interogasi terbuka terhadap fenomena tersebut. Dengan mengembangkan konsep ekonomi politik kebudayaan, ambisi proyek ini adalah membawa literatur hubungan internasional secara kultural dan menekankan literatur ekonomi politik internasional secara kritis ke dalam dialog dengan yang lain dan dengan literatur ekonomi politik, mengisi kesenjangan masing-masing, dan mengembangkan

lebih banyak konsepsi tangguh untuk menganalisis dinamika kultural ekonomi politik global.

Sebagai contoh adalah tentang pandemi Covid-19 yang mengguncang dunia mulai Februari 2020, sehingga aktivitas perekonomian mengalami pelemahan signifikan. Andai kata fenomena ini hanya dijelaskan dengan perspektif *disembedded* atau ketercerabutan ekonomi dari sistem sosial budaya, tentu akan dengan cepat wabah mematikan itu berpotensi tidak teratasi dan menimbulkan bencana kemanusiaan. Ini berarti kebutuhan akan penanggulangan berbagai kebutuhan pengobatan hanya akan diserahkan pada mekanisme pasar semata. Sebaliknya, jika fenomena pandemi Covid-19 yang telah menjadi problem global ini dilihat dari pendekatan dan analisis *embeddedness* atau ketertanaman ekonomi dalam masyarakat, ia menjadi cepat teratasi. Fakta menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai lembaga dan jejaring sosial serta kultur saling mendukung terbukti lebih efektif untuk cepat keluar dari marabahaya. Pada prinsipnya, setiap problem global yang menyangkut kepentingan manusia secara universal tidak mungkin hanya dengan kejemawaan ekonomi semata yang mengandalkan mekanisme pasar. Namun, fakta menunjukkan bahwa persoalan-persoalan seperti pandemi Covid-19 memerlukan pendekatan multidisiplin, antarlembagaan, dan kultur saling mendukung di antara sesama manusia yang melampaui sekat-sekat primordial.

Dewasa ini ekonomi politik kebudayaan semakin tertarik pada isu-isu budaya global dan memiliki potensi untuk membantu fenomena budaya di Indonesia. Dengan mengombinasikan berbagai pendekatan bersifat kritis, maka ekonomi politik kebudayaan dapat digunakan sebagai peranti analisis dan membongkar berbagai dominasi budaya global terhadap budaya lokal. Ia bukan berpretensi untuk secara eksklusif menutup diri demi penyelamatan budaya lokal, melainkan justru mendorong budaya lokal itu sebagai lokalitas yang aktif dan mampu bernegosiasi dengan kehadiran budaya global yang dibawa oleh ekonomi pasar. Topik-topik seperti pertemuan dan persilangan budaya global dan lokal, misalnya tentang busana, makanan,

arsitektur, musik, seni tari, dan bahkan keyakinan, dapat diangkat dengan pendekatan dan analisis ekonomi politik kebudayaan.

Relevansi Ekonomi Politik Kebudayaan dalam Cultural Studies

Keterkaitan ekonomi politik kebudayaan dan *cultural studies* terletak pada irisan karakternya seperti inklusivitas, multidisiplin, penolakannya terhadap epistemologi positivistik, antiesensialisme, prokonstruktivistis, melampaui, cair, dan tentu saja sama-sama sebagai sebuah pendekatan dan analisis kritis. Dalam posisinya yang seperti itu, tidak terlalu berlebihan jika pendekatan dan analisis ekonomi politik kebudayaan memiliki relevansi bagi kajian budaya dan media secara cukup signifikan.

McGuigan (1992) mengajak *cultural studies* untuk terlibat lebih menyeluruh ke dalam ekonomi politik kebudayaan, yaitu dengan mempertanyakan kepemilikan, institusi, kontrol, dan kekuasaan; mengeksplorasi bagaimana momen produksi memasukkan dirinya ke dalam berbagai makna produk kultural. Dia mendukung adanya pendekatan multiperspektif yang menyelidiki hubungan antara ekonomi politik, representasi, teks, dan audiens bersama dengan keterlibatan di dalam kebijakan kultural (Barker, 2000: 365). Seraya mendukung pendekatan multiperspektif, Douglas Kellner (1997) merekomendasikan ekonomi politik pada *cultural studies* tekstual agar mampu: (a) menunjukkan bagaimana produksi kultural berlangsung di dalam relasi historis, politik, dan ekonomi spesifik yang menstrukturkan makna tekstual; (b) menunjukkan bagaimana masyarakat kapitalis diorganisasi menurut cara produksi dominan yang terpusat pada komodifikasi dan upaya mengejar keuntungan; (c) memperhatikan fakta bahwa budaya diproduksi di dalam vektor dominan dan subordinasi; dan (d) membuka batas-batas serta cakupan diskursus dan teks ideologis dan politis, yang mungkin terjadi pada alur historis tertentu.

Suara senada juga datang dari Richard Maxwell (2001) yang mengatakan bahwa ekonomi politik memiliki karakter satu spirit dengan *cultural studies* dalam dua cara: sebagai problem empiris dan

sebagai satu pasang proposisi teoretis dan asumsi-asumsi. Ekonomi politik empiris dapat digambarkan sebagai interaksi dinamis ekonomi dan politik, yakni relasi-relasi yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan di mana relasi kuasa menentukan perangkat dan hasil ekonomi secara simultan, di mana kekuatan ekonomi membatasi pemikiran dan tindakan politik. Sebagai sebuah problem empiris, pertanyaan utama yang menantang kerja *cultural studies* adalah bagaimana ekonomi politik didefinisikan, ditata, dan diatur oleh industri budaya dan tenaga kerja budaya, yang meliputi kerja dalam produksi, distribusi, dan konsumsi budaya (Maxwell, 2001: 117). Terkait dengan isu peran menentukan dari industri budaya, pendekatan ekonomi politik kebudayaan dan *cultural studies* sama-sama berutang pada teori budaya Marxis, meskipun tentu saja keduanya memberikan catatan kritis.

Marxis yang setuju dengan sentimen umum bahwa ideologi melindungi *status quo* kapitalis, tetapi teori budaya Marxis, khususnya analisis Mazhab Frankfurt terhadap industri budaya, melihat kebudayaan sebagai fenomena yang lebih independen dibandingkan dengan yang dinyatakan oleh komentar Engels dan Marx. Budaya bukan semata-mata refleksi atas representasi sistem ekonomi, melainkan benar-benar tampak beroperasi secara independen dari ekonomi. Citra ini perlu menurut teoretikus budaya Marxis, terutama bagi budaya, untuk mendapatkan efek yang memengaruhi imajinasi dan perilaku masyarakat. Jika budaya dilihat semata-mata mengkhotbahkan nilai sistem sebagai doktrin, ia tidak akan begitu "hegemonik" (mencakup secara keseluruhan), sehingga menjadi independen dari ekonomi sebagaimana yang dinyatakan Gramsci. Namun, budaya memainkan peran yang lebih nyata pada kapitalisme akhir, sebagaimana diperdebatkan oleh Mazhab Frankfurt dalam analisis mereka tentang industri budaya (Ager, 2009: 249).

Baik ekonomi politik kebudayaan dan *cultural studies* yang sama-sama beririsan dengan Marxis juga berkepentingan menempatkan ideologi sebagai kajian. Karena itu, keduanya juga berupaya membongkar beroperasinya ideologi dalam ranah budaya, yang justru dalam praktik beroperasi secara lembut. Dalam posisi itu,

keduanya menjadi perangkat analisis yang terus mengembangkan diri agar mampu melakukan perabaan terhadap ideologi yang senantiasa berkepentingan dan menyembunyikan sesuatu untuk mengendalikan pikiran. Meskipun pada mulanya ekonomi politik, terutama pada era Marxisme ortodoks, ada upaya pembongkaran ideologi itu dengan melakukan kritik ideologi, dalam perkembangan lebih lanjut mengikuti gaya *cultural studies* dengan melakukan apa yang oleh Ben Agger (2003) disebut sebagai kritik identitas. Ini dengan mempertimbangkan bahwa ideologi beroperasi semakin canggih, tidak lagi menanamkan dalam hubungan produksi di pabrik-pabrik dengan kesadaran palsu dan alienasi atau pun reifikasi, tetapi beroperasi pada berbagai aspek kehidupan sosial budaya sehari-hari secara lebih halus dan canggih.

Kini manusia harus mengalami ideologi, bukan hanya membaca atau menerimanya melalui indoktrinasi ideologi aktif. Ideologi harus mencakup seluruh kehidupan manusia sehari-hari, menutupi dirinya sendiri untuk mengekspresikan pesan ringan dan sublimalnya. Ideologi tidak kejam, bahkan tidak diskursif, secara hati-hati diperdebatkan, dan sistematis. Namun, ideologi terikat dengan wacana budaya serta praktik representasi dan pengalaman, sehingga manusia kehilangan pemisah antara yang nyata dan yang bersifat ilusi. Sama sekali tidak jelas apa itu teks, yang telah berubah menjadi bentuk tradisional representasi ideologis sejak permulaan agama doktriner. Perbedaan antara teks dan dunia semakin kabur dalam pasca-modernitas sejauh manusia tidak mengenali iklan sebagai jalinan dan argumen ideologi sebagaimana adanya mereka merayakan konsumerisme sebagai cara untuk memperluas alienasi. Bukan hanya televisi, film, koran, bahkan buku dan teks akademis “dibaca” sebagai sumber argumen politis. Mereka juga terjebak dengan “kenyataan”, sehingga kita lupa perbedaan antara “The Cosby Show” dan keluarga sejati atau film JFK dan yang terjadi di Dallas pada 22 November 1963 (Agger, 2009: 252–253).

Meskipun sebagian pascamodernis meneriakkan ideologi besar telah mati, dalam praktik mereka tetap beroperasi dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam konteks di Indonesia, ideologi

vulgar dalam agama maupun pabrik-pabrik masih menunjukkan karakternya ketika era Abad Pertengahan dan era kapitalisme awal. Tidak terlalu sulit menemukan praktik ideologis itu terus menghujam dalam struktur kognisi dan kesadaran orang Indonesia, atau apa yang dikenal dengan praktik “*altekonisasi*” pikiran ideologis. Praktik *altekonisasi* ideologis ini berlangsung dalam praktik kehidupan sehari-hari, ke samping, ke atas, ke bawah, dan ke segala penjuru. Bahkan, praktik *altekonisasi* merasuk secara sistematis dalam berbagai institusi sosial strategis seperti keluarga, lembaga sekolah, dan institusi media. Upaya mencairkan dan menetralkan praktik *altekonisasi* ideologis itu sangat diperlukan dengan menggunakan pendekatan dan analisis kritis ekonomi politik kebudayaan dan *cultural studies*. Jadi, ideologi belum musnah, bahkan semakin menunjukkan gejala menguat kembali.

Ideologi telah menjadi efektif dalam mengalihkan perhatian orang dari politik dan ruang publik. Kesulitan manusia semakin dipersonalkan dan dipsikologikan, diperlakukan oleh berbagai *program dua belas langkah*, aerobik, dan agama, juga oleh belanja dan konsumsi. Depolitisasi kehidupan publik adalah ciri utama kapitalisme akhir, yaitu tenggelamnya ruang publik ke dalam satu jalinan kabel yang membawa lalu lintas elektronik jalur cepat informasi. Era kapitalisme akhir ini ditandai oleh meningkatnya arti penting budaya pop dalam kehidupan manusia, mengalihkan perhatian mereka, memenuhi fantasi mereka, menenangkan kegelisahan mereka, dan menggiring mereka untuk berbelanja. Ideologi belum musnah, kini ia ditemukan dalam wahana yang tak terantisipasi oleh Marx, yang tidak dapat meramalkan industri budaya dan di *world wide web* (Agger, 2009: 256).

Tentu saja, untuk konteks di Indonesia, praktik beroperasinya ideologi itu masih bisa diperpanjang seperti pada aktivitas kuliner, wisata, olahraga sepeda, lari maraton, *touring montor gedhe*, reuni, dan sederet aktivitas rekreatif lain yang berfungsi mengalihkan perhatian dan menawarkan kenikmatan subjektif sesaat. Demikian pula berbagai aktivitas dalam dunia virtual yang berkaitan dengan konstruksi identitas, representasi, artikulasi, dan berbagai bentuk

keterlibatan dalam permainan rekreatif melalui media sosial, semuanya mengandung proses pengendalian pikiran yang bisa mengalihkan perhatian dari dunia nyata. Terhadap praktik sosial budaya seperti itu, adalah tugas ekonomi politik kebudayaan dan *cultural studies* untuk membongkar muatan ideologinya. Sama-sama memiliki perhatian terhadap ideologi dan produksi makna, menjadikan ekonomi politik kebudayaan dan *cultural studies* menggunakan analisis semiotika dalam upaya membongkar ideologi dan mitos teks.

Melalui semiotika, keduanya mengeksplorasi bagaimana makna yang terbentuk oleh teks diperoleh melalui penataan tanda dengan cara tertentu dan melalui penggunaan kode-kode kultural. Analisis tersebut lebih berfokus pada ideologi atau mitos teks. Sebagai contoh, analisis semiotika menggambarkan kasus bahwa berita televisi adalah representasi yang dikonstruksi, bukan cermin realitas. Representasi yang selektif dan sarat nilai dari media bukanlah gambaran “akurat” dunia, melainkan arena perjuangan memperebutkan hal-hal yang disebut sebagai makna dan kebenaran. Televisi bisa tampak “realistis” karena adanya penyuntingan tanpa cacat dan penyuntingan “yang halus”, tetapi realisme semacam itu lebih banyak dibentuk oleh serangkaian konvensi estetis ketimbang sebuah refleksi “dunia nyata” (Barker, 2000: 31).

Demikianlah, tentu saja kedekatan ekonomi politik kebudayaan dan *cultural studies* terhadap teori budaya Marxis bukan tanpa catatan kritis. Teori budaya Marxis yang bermuatan determinisme budaya, pesimistis, dan mengabaikan budaya pop mendapatkan penyikapan secara kritis oleh kedua pendekatan tersebut sebagai konsekuensi posisinya yang nondeterministis, inklusif, dan multidisiplin. Karena itu, kedua pendekatan tersebut juga sama-sama menggunakan pascastrukturalisme yang berfokus pada wacana, sehingga keduanya menggunakan analisis wacana kritis, praktik diskursif Foucaultian, dan instabilitas bahasa Derridarian sebagai perangkat analisisnya terhadap praktik budaya. Melalui analisis wacana kritis ini keduanya juga mengangkat isu budaya global dan sekaligus lokalitas dengan meminjam teori globalisasi yang lebih kulturalis dari, misalnya, Roland Robertson (1992).

Menyandingkan kedua pendekatan tersebut bukan berpretensi untuk menyamakan ataupun membedakannya, melainkan sekadar menunjukkan adanya irisan yang barangkali bisa saling melengkapi. Sebab, bagaimanapun *cultural studies* merupakan sebuah pendekatan yang tidak bisa secara serampangan disamakan dengan disiplin lain, karena posisinya yang multidisiplin dan bahkan antidisiplin. Lebih dari itu, tetap saja sulit menetapkan batas-batas *cultural studies* sebagai satu disiplin akademis yang utuh dan padu yang mampu menjelaskan beberapa topik, konsep, dan metode substantif yang membedakannya dari disiplin lain. Namun, antara ekonomi politik kebudayaan dan *cultural studies* setidaknya memiliki satu spirit yang sama dalam memproblematisasi kebudayaan sebagai proyek politis. Yang dipertaruhkan kedua pendekatan ini adalah soal relasi kuasa, soal kebutuhan akan perubahan, serta soal representasi atas dan bagi kelompok marginal berkaitan dengan isu kelas, identitas, gender, dan ras. Semua itu bermuara pada cita-cita bahwa ekonomi politik kebudayaan dan *cultural studies* sebagai pendekatan kritis ingin terus menjadi bagian upaya mendorong perubahan sosial yang emansipatoris dan partisipatoris.

Daftar Pustaka

- Agger, Ben. 2003. *Teori Sosial Kritis: Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: SAGE Publications.
- . 2004. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Diterjemahkan Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Best, Jaqueline dan Matthew Paterson (ed.) 2010. “Understanding Cultural Political Economy”. Dalam *Cultural Political Economy*, hlm 1–25. London dan New York: Routledge (RIPE Series).
- Boudon, Raimond. 2001. *The Origin of Value*. London dan New Branswick: Transaction.
- . 2011. “Teori Pilihan Rasional”. Dalam Bryan S. Turner (ed.), *Teori Sosial: Dari Klasik Sampai Postmodern*.

- Diterjemahkan Setiyawati dan Roh Shufiyati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Granovetter, Mark dan Richard Swedberg (ed.). 2001. *The Sociology of Economic Life*. Westview Press.
- Jacobs, Mark D. dan Lynette Spillman. 2005. "Cultural sociology at the crossroads of the discipline". *Poetics*, 1, hlm. 1-14.
- Jessop, Bob. tt. "Regulationist and Autopoieticist Reflections on Polanyi's Account of Market Economies and the Market Societies". Departement of Sociology, Lancaster University. <http://www.comp.lancs.ac.uk/sociology/papers/Jessop-Regulationist-and-Autopoieticist-Reflections.pdf>.
- . 2004. "Critical Semiotic Analysis and Cultural Political Economy". *Critical Discourse Studies*, versi daring, 1(2), hlm. 159-174.
- Kleden, Ignas. 1986. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Maxwell, Richard. 2001. "Political Economy within Cultural Studies". Dalam Toby Millerr (ed.), *A Companion to Cultural Studies*, hlm. 116-138. Oxford: Blackwell Publishers.
- Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication: Rethinking and Renew*. London: SAGE Publications.
- Ngai-Ling Sum dan Jessop, B. 2013. *Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in Its Place*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Polanyi, Karl. 2001. *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Times*. Beacon Press.
- Reed, Isaac dan Jeffrey C. Alexander. 2011. "Sosiologi Kebudayaan". Dalam Bryan S. Turner (ed.), *Teori Sosial: Dari Klasik Sampai Postmodern*. Diterjemahkan Setiyawati dan Roh Shufiyati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Diterjemahkan oleh Saut Pasibu dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Steinmetz, G. 1999. *State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn*. Ithaca, NY: Cornell University Press.

- Swedberg, Richcard. 2011. "Sosiologi Ekonomi". Dalam Bryan S. Turner (ed.), *Teori Sosial: Dari Klasik Sampai Postmodern*. Diterjemahkan Setiyawati dan Roh Shufiyati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Turner, S. Bryan (ed.). 2011. *Teori Sosial: Dari Klasik Sampai Postmodern*. Diterjemahkan Setiyawati dan Roh Shufiyati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.